

**SKRIPSI**

**PERAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA  
(KUBE) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN PIDIE JAYA**



**Disusun Oleh**

**YULIA ANANDA  
NIM. 160604076**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yulia Ananda  
NIM : 160604076  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Yulia Ananda.

Yulia Ananda

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI  
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi  
Dengan Judul:

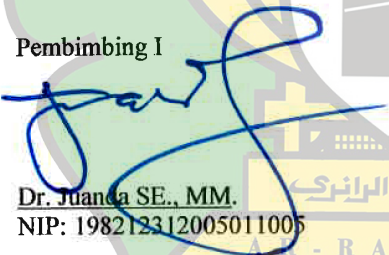
**Peran Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam  
Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya**

Disusun Oleh:

**Yulia Ananda**  
NIM. 160604076

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi  
pada Program Studi Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

  
Dr. Juanda SE., MM.  
NIP: 198212312005011005

Pembimbing II

  
A. Rahmad Adi, SE., M.Si.  
NIDN: 2025027902

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.  
NIP: 197204281999031005

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Peran Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam  
Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya**

Yulia Ananda  
NIM. 160604076

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 14 Januari 2022 M  
12 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

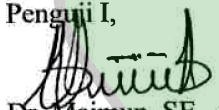
Ketua,

  
Dr. Juanda, SE., MM.  
NIP.198212312005011005

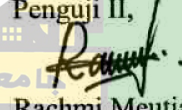
Sekretaris,

  
A. Rahmat Adi, SE., M.Si.  
NIDN. 2025027902

Penguji I,

  
Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si.  
NIP. 197009171997031002

Penguji II,

  
Rachmi Meutia, M.Sc.  
NIP. 198803192019032013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
\* Dr. Zaki Fuad, M. Ag.  
NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yulia Ananda

NIM : 160604076

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : [yuliannya29@gmail.com](mailto:yuliannya29@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul:

**Peran Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 Januari 2023

Penulis

Yulia Ananda  
NIM.160604076

Pembimbing I

Dr. Landa, SE., MM.  
NIP.198212312005011005

Pembimbing II

A. Rahmad Adi, SE., M.Si.  
NIDN. 2025027902

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

.....وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ  
الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

And never give up hope of Allah's Soothing Mercy. Truly no one  
despairs of Allah's Soothing Mercy, except those who have no faith.

“... dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya  
tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. (QS.  
Yusuf: 87)

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang terkasih saya, yaitu kedua  
orang tua saya, Ayah dan Ibu beserta adik-adik tercinta yang selalu  
mendoakan dan mendukung saya dalam segi apapun.  
Dengan ini saya berharap bisa sedikitnya membahagiakan mereka.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesatuan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya”**. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta pembantu Dekan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua program studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta memotivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Marwiyati, S.E., M.M selaku Penasehat Akademik program studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta memotivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Juanda, SE., MM selaku pembimbing I dan Bapak A.Rahmad Adi, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulisan selama ini.
6. Staf pustaka selaku karyawan yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menambah referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya yang telah memberikan kesempatan meneliti dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah ibu dan bapak serta kawan-kawan berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifatnya membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 23 Januari 2023

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Yulia Ananda

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلَ

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

*qala*: قَالَ

*rama*: رَمَى

qila: قِيلَ  
yaqulu: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

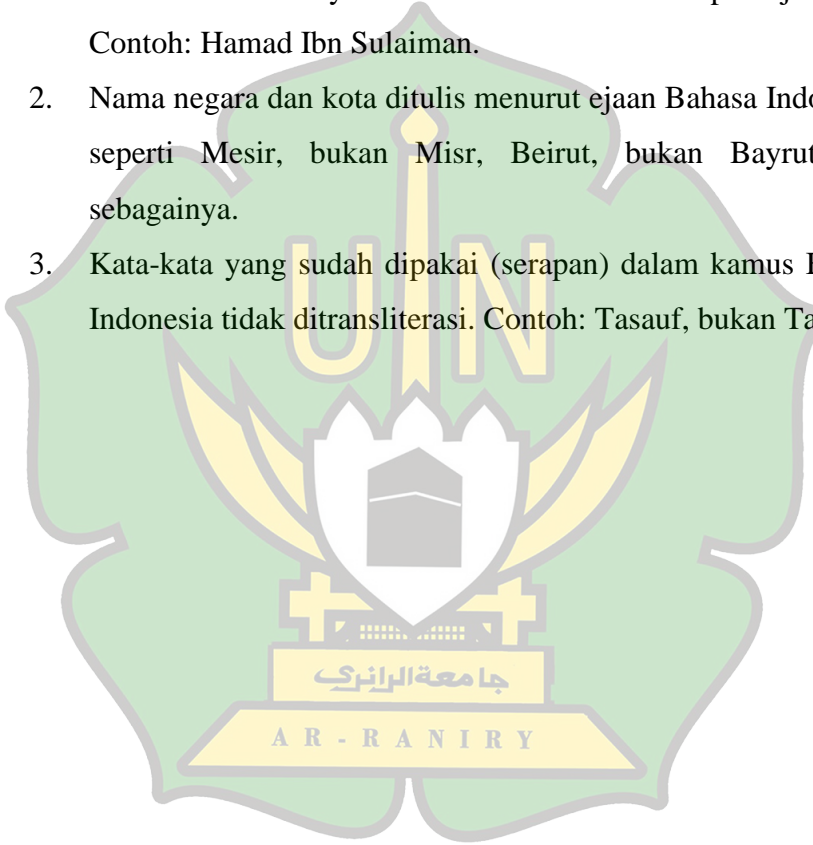
raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
al-madinatul munawwarah  
talhah : طَلْحَةُ



**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Yulia Ananda  
NIM : 160604076  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Ilmu Ekonomi  
Judul Skripsi : Peran Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya  
Pembimbing I : Dr. Juanda, S.E., MM.  
Pembimbing II : A. Rahmad Adi, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala pelaksanaan program KUBE dalam pengentasan kemiskinan serta kebijakan pemerintah melalui Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitian terdiri dari 17 informan. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pelaksanaan program KUBE dalam pengentasan kemiskinan, maka pihak dinas sosial melakukan sosialisasi untuk menentukan kriteria masyarakat yang layak menerima bantuan program KUBE. Kebijakan pemerintah melalui Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program KUBE dengan mengusulkan beberapa program seperti tahun-tahun sebelumnya. Kendala dalam pelaksanaan program KUBE diantaranya; masih ada sebagian anggota penerima bantuan kurang produktif untuk hadir. Kendala yang dialami pihak dinas sejak tahun 2020 pada masa pandemi sampai sekarang tidak ada pemberian bantuan KUBE seperti tahun sebelumnya, sehingga pihak dinas sosial sulit untuk membandingkan seberapa berpengaruhnya bantuan KUBE dalam mengentaskan kemiskinan serta perbedaan pendapatan antar sesama anggota.

**Kata Kunci:** *Program Kelompok Usaha Bersama, dan Mengentaskan Kemiskinan*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Teori Peran .....	14
2.2 Teori Kesejahteraan.....	17
2.3 Kemiskinan.....	20
2.3.1 Macam-Macam Kemiskinan.....	21
2.3.2 Penyebab Kemiskinan.....	23
2.3.3 Pengentasan Kemiskinan .....	26
2.4 Pemberdayaan Masyarakat.....	28
2.5 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	30
2.6 Penelitian Terdahulu.....	44
2.7 Kerangka Berpikir .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	50
3.2 Informan Penelitian .....	50

3.3 Sumber Data .....	52
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.5 Pengabsahan Data.....	55
3.6 Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Deskripsi Penelitian.....	58
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
4.1.2 Profil Kabupaten Pidie Jaya .....	61
4.1.3 Profil Dinas Sosial Pidie Jaya .....	63
4.2 Kependudukan Pidie Jaya.....	65
4.2.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk .....	66
4.2.2 Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan .....	68
4.3 Hasil Penelitian.....	70
4.3.1 Peran Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.....	71
4.3.2 Kebijakan Pemerintah Melalui Dinas Sosial dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya .....	88
4.3.3 Kendala dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.....	97
4.4 Pembahasan .....	100
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>106</b>
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kemiskinan dan Presentase Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya (2015-2020).....	3
Tabel 1.2 Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Jenis Usaha di Kabupaten Pidie Jaya (2020) .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	44
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	52
Tabel 4.1 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) .....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	48
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh .....	63
Gambar 4.2 Pertumbuhan Penduduk (Jiwa) .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing Tahun Akademik 2021/2022 ...	112
Lampiran 2	Surat Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.....	113
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Kabupaten Pidie Jaya .....	114
Lampiran 4	Pedoman Wawancara .....	115
Lampiran 5	Daftar Nama-Nama yang Diteliti .....	119
Lampiran 6	Foto Dokumentasi .....	120
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	125





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkepulauan dan berkembang, masalah kemiskinan tidak luput dari kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi penyakit perekonomian (Bahagia, 2020). Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global dan menjadi perhatian banyak orang di seluruh dunia. Menurut Tami et al. (2020), kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Jumlah orang miskin tidak pernah berkurang, bahkan kemiskinan bisa dikatakan telah berubah menjadi wajah teror yang melanda dunia. Di Indonesia kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan namun harus di akui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Supriyana (2010), kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu Negara berkembang maupun sedang berkembang. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan permasalahan utama pembangunan. Masalah kemiskinan di Indonesia telah menimbulkan persoalan besar dan perlu penanganan yang serius, dan penyebabnya bukan karena kurang pangan, tetapi miskin pada umumnya, lemah dalam berusaha dan terbatas aksesibilitas pada kegiatan sosial, budaya dan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Kemiskinan adalah di mana seseorang tidak dapat mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, kesehatan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan. Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa kelangkaan alat pemenuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerja kemiskinan sangat erat kaitan hubungan dengan kesejahteraan dan tingkat minimum pendapatan oleh masyarakat.

Pidie Jaya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pidie, di mana sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Semenjak pemekaran sampai saat sekarang Kabupaten Pidie Jaya tumbuh dengan melambat, baik itu dari segi sektor ekonomi

maupun dari segi infrastruktur pembangunannya. Kabupaten Pidie Jaya memiliki 8 Kecamatan, yaitu; Kecamatan Bandar baru, Panteraja, Trienggadeng, Meuredu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Bandar Dua. Kabupaten Pidie Jaya memiliki jumlah penduduk seluruhnya sebesar 158,40 ribu. Di samping itu, yang menjadi perhatian adalah angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya yang masih relatif besar. Berikut merupakan data jumlah kemiskinan dan presentase kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya selama (2015-2020), penggunaan data (5) lima tahun terakhir adalah untuk menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kemiskinan dan Presentase Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya (2015-2020)**

No.	Tahun	Jumlah Kemiskinan (Ribu)	Persentase Kemiskinan (%)
1	2015	31,81	21,40
2	2016	31,94	21,18
3	2017	33,60	21,82
4	2018	31,72	20,17
5	2019	30,97	19,31
6	2020	31,39	19,19

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Pidie Jaya

Berdasarkan Tabel 1.1 data di atas dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya relatif tetap, sedangkan presentase kemiskinan mengalami trend menurun, tetapi tidak begitu signifikan penurunannya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 dan 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari (30,97) ribu sampai (31,39) ribu. Namun, jika dilihat presentase kemiskinan pada tahun 2018 sebesar (20,17) persen turun pada tahun 2019 menjadi (19,31) persen, dan kemudian naik kembali pada tahun 2020 menjadi (19,19) persen.

Kondisi kemiskinan yang masih menjadi beban negara Indonesia terutama Provinsi Aceh yang pada saat ini menduduki kemiskinan nomor satu ditingkat sumatera dan nomor tujuh di tingkat nasional. Hal ini menjadi angka paradoks di mana Provinsi Aceh yang tercatat sebagai daerah terkaya ketujuh tingkat nasional dengan menerima kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) dari Pemerintah Pusat sejumlah 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dari tahun 2008-2022, tetapi sampai saat sekarang dana yang mengalir tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik, dengan bukti saat kemiskinan masih memberikan apresiasi kepada daerah Keistimewaan Provinsi Aceh.

Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama yang bahwa untuk mengentaskan kemiskinan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diperlukan upaya pemberdayaan sosial

terhadap kelompok yang ditujukan kepada kumpulan orang, baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, harapannya bisa menanggulangi kemiskinan di daerah-daerah.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Di samping itu, dalam peraturan menteri tersebut mengembankan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial setempat, sebagaimana yang dimaksud bab 5, Pasal 13 poin (a) dan (b) bahwa pemohon bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diajukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten.

Merujuk pada Peraturan Menteri maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Sosial Kabupaten dapat melaksanakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya. Sebagaimana yang dimaksud adalah dengan memberikan bantuan melalui program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Menurut keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya menyatakan bahwa saat ini sudah berdiri 60 Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Berikut merupakan data jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Pidie Jaya:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Jenis Usaha di Kabupaten Pidie Jaya (2020)**

No.	Kecamatan	Jumlah KUBE/Kecamatan	Jenis Usaha
1.	Banda Baru	12	Jualan kios, usaha pembuatan kue, dan menjahit.
2.	Panteraja	1	Menjahit.
3.	Trienggadeng	17	Jualan kios, membuat kue, menjahit, dan anyaman tikar.
4.	Meureudu	12	Jualan kios, membuat kue, menjahit, dan petani bawang merah.
5.	Meurah Dua	3	Jualan kios dan membuat kue.
6.	Ulim	6	Bengkel las, pembuatan kue, dan menjahit,

**Tabel 1.2-Lanjutan**

7.	Jangka Buya	6	Jualan kios, pembuatan kue, dan menjahit.
8.	Bandar Dua	3	Jualan kios, pembuatan kue, dan menjahit.
<b>Jumlah</b>		<b>60 Kelompok Usaha Bersama</b>	

Sumber Data: Dinas Sosial Pidie Jaya

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 60 unit Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Pidie Jaya tidak begitu bervariasi jenis usahanya dan masih minimnya tersebar Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jika dilihat dari terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terbanyak di Kecamatan Trienggadeng terdapat 17 kelompok, sedangkan paling mini di Kecamatan Panteraja hanya 1 kelompok. Tersebaranya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Pidie Jaya juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengorganisasikan diri untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk usaha bersama. Namun, dalam hal ini ada tugas Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya dalam mensosialisasikan program tersebut untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, karena secara pertimbangan kemiskinan tidak hanya di Kecamatan Trienggadeng saja dan begitu pula dengan persebaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) seharusnya juga diimbangi di seluruh Kabupaten Pidie Jaya.



Menurut pengamatan awal penulis, sekilas dari jenis usaha memang produktif tetapi dari 60 unit Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut saat sekarang terdapat keterbatasan dari kelompok dalam mengembangkan usaha dan masalah kelanjutannya. Di samping itu, belum ada usaha yang memang bisa dijadikan suatu produk pengembangan yang berdasarkan potensi daerah, kalau dilihat lebih dalam hampir semua Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya terdapat potensi unggulan seperti di Kecamatan Bandar Baru terdapat potensi unggulan kakao di kebun rakyat yang bisa diolah oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE), karena sejauh ini kakao di Kecamatan itu hanya di jual oleh masyarakat hanya dalam bentuk mentah setelah di panen. Jika hal itu dilakukan bisa menjadi penggerak ekonomi dilingkungan masyarakat dan pemerintah, tetapi dibutuhkan kesungguhan dari pemerintah dalam mengembangkan daerah serta bisa mengentaskan kemiskinan karena masalah tersebut memang tugas pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk-produk kreatif dan inovatif di Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut Haryati (2013), tentang kebijakan penanganan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Menyatakan bahwa kriteria sasaran program belum mengacu pada kriteria dari BPS (14 kriteria Penduduk miskin) dan kriteria Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Pada tataran proses

pelaksanaan juga belum seluruh tahapan dilaksanakan secara runtut.

Menurut Tami et al. (2020), tentang implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan fakir miskin. Menyatakan bahwa implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adanya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dinas Sosial Provinsi Riau tidak dapat menjalankan 4 (empat) faktor tersebut maka akan timbul hambatan yang dapat memicu terjadinya kegagalan dalam mengimplementasikan program KUBE.

Menurut Sri Yuni dan Hidayatulloh (2015), tentang kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan. Menyatakan bahwa analisis kinerja kube dilihat dari aspek sosial, ada lima kube bernilai baik dan tiga kube bernilai kurang, dilihat dari aspek ekonomi terdapat satu kube bernilai baik, tiga kube bernilai cukup, dan empat kube bernilai kurang. Dilihat dari aspek kelembagaan, ada satu kube yang bernilai baik dan tiga kube bernilai cukup serta empat Kube bernilai kurang.

Menurut Nurmayanti, et al. (2020), tentang pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berbasis potensi lokal dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Menyatakan bahwa potensi lokal masyarakat adalah di bidang anyaman rotan dan ketak. Ketrampilan menganyam ini dimiliki oleh kaum perempuan Desa Saba sebagai ketrampilan turun temurun namun belum dilakukan secara profesional, dilakukan sosialisasi mengenai kelompok usaha

bersama (KUBE) dengan mendatangkan narasumber dari dinas sosial kabupaten, mensosialisasikan syarat-syarat administrasi pembentukan kelompok usaha bersama kepada ibu-ibu pengrajin anyaman.

Permasalahan kemiskinan adalah masalah kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan kemiskinan sudah menjadi masalah mendasar bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu, masalah kemiskinan membutuhkan kinerja yang transparansi dalam pengelolaan pemberdayaan. Oleh sebab itu, kehadiran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Dinas Sosial diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat serta dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk diadakan suatu kajian tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Pidie Jaya. Meskipun sudah beberapa upaya dilakukan seperti penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta sudah terdapat (60) unit Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya dengan tujuan bisa mengentaskan kemiskinan, tetapi masih saja terdapat ketimpangan dan kemiskinan di lingkungan masyarakat setempat. Dalam hal tersebut juga ada kendala dalam masyarakat maupun dari penyaluran bantuan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “Peran Program

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah melalui Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari masalah akan menggambarkan hasil dan pembahasan yang akan diperoleh dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah melalui Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya

3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya, menambah wawasan khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca tentang peran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Pidie Jaya, serta dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengembangkan penelitian yang sejenis.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga lain yang terkait dalam mengambil kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan contoh bagi pihak-pihak terkait lainnya tentang pentingnya pengentasan kemiskinan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori peran, program kesejahteraan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kemiskinan, penyebab kemiskinan, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Peran**

Dalam Soraya (2017), menyatakan peran adalah sekumpulan tingkah laku yang berhubungan dengan suatu kedudukan atau posisi tertentu. Di samping itu, peran juga dapat berbeda sebagaimana terlihat dari tingkah laku yang berbeda juga, serta sesuatu yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi, namun tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang melakukan peran tersebut. Misalnya seseorang yang menjalankan program dalam melakukan perannya selalu terlihat bijak dalam melakukan arahan, tetapi tergantung dengan kondisi dan perilakunya.

Menurut Soraya (2017: 10), peran adalah suatu aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran program tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan terlihat berdampak baik seperti yang dijalankan pada keinginan lingkungannya. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam



hal ini merupakan seikat peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peran merupakan suatu konsep perihal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Menurut Soraya (2017: 11), peran juga merupakan suatu kedudukan hukum yang meliputi tugas, fungsi, dan kewenangan aparaturnya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga dengan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Menurut Soraya (2017: 11), peran suatu lembaga berkaitan dengan pelaksana tugas, dan fungsi, seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang

harus dituntaskan seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya masing-masing. Fungsi sebuah lembaga atau institusi disusun berdasarkan pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Menurut Soraya (2017), secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yang berdasarkan pada hukum publik, seperti wewenang, hak dan kewajiban. Selain itu, agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, maka dibedakan sebagai berikut:

- a. Pemberian wewenang adalah pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat).
- b. Pelaksanaan wewenang adalah menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan.
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang merupakan seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.

Menurut Bahagia (2020), peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam lembaga, organisasi maupun komunitas di tengah-tengah masyarakat. Tugas dan fungsi yang berkaitan erat

dengan hukum publik, kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hak dan tanggungjawab, atau secara wewenang merupakan kemampuan tindakan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dimengerti bahwa dalam melakukan sesuatu hal bagi seseorang yang mempunyai posisi dalam lembaga sangat berkaitan hukum, kewenangan, dan tanggungjawab individu terhadap pelaksanaan tersebut. Dalam hal ini, berkaitan dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang di mana sudah diatur dalam peraturan menteri Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama, serta dikembangkan pada lembaga sosial atau Dinas Sosial dalam menjalankan dan membina mengembangkan usaha, memberi modal, dan pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar program yang dijalankan mampu mengentaskan kemiskinan.

## **2.2 Teori Kesejahteraan**

Menurut Wardianti (2019), sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaan dan sebagainya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari standar kehidupan

masyarakat. Menurut Rudi (2012), definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Di samping itu, juga memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya, sehingga memiliki kualitas hidup yang sama dengan warga yang lainnya. Di sisi lain pula terdapat pendapat bahwa kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya, serta kemampuan membaca penting bukan karena kepuasan yang dihasilkan tapi karena membaca akan membentuk kepribadian, dan memberikan hak suara penting bukan karena menaikkan kepuasan tetapi karena menghargai sistem politik.

Menurut Bahagia (2020), mengenai kesejahteraan tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan, diantaranya dari pengukuran kemiskinan itu sendiri. Pindyck, menyatakan bahwa kesejahteraan menjadi antitesis dari kemiskinan yang dialami oleh seseorang. Kaitannya kesejahteraan dengan kemiskinan tercermin dari pengukuran kesejahteraan menggunakan garis kemiskinan yaitu dengan standar USD \$1 atau USD \$2 perkapital perhari. Semakin besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka akan mencerminkan semakin rendah taraf

kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Menurut Rahardjo (2016), pengertian kesejahteraan umum mengacu pada teori *utilitarianisme* yang bahwa kebenaran adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang.

Menurut Rahardjo (2016), untuk menilai taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara harus dilakukan pengukuran kesejahteraan. Pada tataran global terjadi perdebatan mengenai indikator pengukuran atas kesejahteraan mewakili dua kubu dengan pandangan pembangunan yang berbeda. Kubu pertama menilai kesejahteraan harus diukur dari PDB dan pendapatan perkapita, sedangkan kubu kedua memandang kesejahteraan harus dilihat dari pembangunan manusia. Tetapi Sen dan Ul Haq dalam Bahagia (2020), menolak PDB sebagai pengukuran kesejahteraan yang dilakukan dengan merancang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memuat tiga hal yakni pendapatan perkapita, usia harapan hidup, dan angka partisipasi sekolah sebagai alternatif untuk melihat kesejahteraan. Indeks pembangunan manusia memuat pemikiran bahwa rakyat merupakan kekayaan sebenar-benarnya dari sebuah negara dan pembangunan harus membuat lingkungan yang memungkinkan penghuninya untuk menikmati hidup panjang, sehat, dan berdaya cipta.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa kesejahteraan merupakan bagian dasar dalam pengukuran kemiskinan dan kesejahteraan adalah kekuatan seseorang untuk bertahan hidup untuk lebih baik, karena seseorang terus berusaha

untuk sejahtera, memenuhi kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

### **2.3 Kemiskinan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemiskinan adalah tidak berharta benda, serba kekurangan, dan sangat melarat (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014: 581). Menurut Katmas (2018), kemiskinan adalah seseorang yang tidak terpenuhinya standar hidup layak, karena kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kehidupan yang baik. Sedangkan Menurut Arsyad (2010), kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan yang meliputi konsumsi pribadi dan kebutuhan pelayanan sosial. Kemiskinan relatif adalah di mana tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh lingkungan sekitarnya.

Limbong (2011) membagi kemiskinan menjadi tiga kategori yaitu kemiskinan ekstrem (absolut), kemiskinan moderat dan kemiskinan relatif. Kemiskinan ekstrem adalah sebuah kondisi dimana rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mempertahankan hidup. Kondisi rumah tangga



yang mengalami kemiskinan ekstrem ditandai dengan kelaparan kronis, tidak mampu mengakses layanan kesehatan, tidak memiliki sumber air, sanitasi yang baik, tidak dapat menjangkau layanan pendidikan, dan mungkin kekurangan perlindungan dasar. Kemiskinan moderat merujuk kondisi dimana rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar saja, dan kemiskinan relatif merupakan pendapatan rumah tangga yang berada di bawah proporsi rata-rata pendapatan nasional.

Menurut Subandi (2014), kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu, kemiskinan alami (kultural), dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alami berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, tingkat produktivitas, dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan masalah yang timbul dari laju pembangunan, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Suyanto (2013), ciri utama kemiskinan struktural adalah tidak terjadinya mobilitas sosial vertikal, kalau adapun sifatnya lamban sekali. Masyarakat miskin akan tetap miskin, sedangkan golongan kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada lingkungan struktural yang membuat orang miskin menjadi malas untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

### **2.3.1 Macam-Macam Kemiskinan**

Menurut Arsyad (2010), kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan



kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan yang meliputi konsumsi pribadi dan kebutuhan pelayanan sosial. Kemiskinan relatif merupakan di mana tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut Subandi (2014), kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu, kemiskinan alami (kultural), dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alami berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, tingkat produktivitas, dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan masalah yang timbul dari laju pembangunan, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kemiskinan buatan kerap sering disamakan dengan pengertian kemiskinan struktural. Arsyad (2010:301), menganggap bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut. Sehingga, membuat masyarakat tidak mampu menikmati sumber pendapatan yang tersedia. Tetapi menurut Limbong (2011: 221) kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang terorganisasi. Sehingga, terjadi proses kemiskinan rakyat.

Ciri utama kemiskinan struktural adalah tidak terjadinya mobilitas sosial vertikal, kalau adapun sifatnya lamban sekali. Masyarakat miskin akan tetap miskin, sedangkan golongan kaya

akan tetap menikmati kekayaannya. Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada lingkungan struktural yang membuat orang miskin menjadi malas untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Suyanto, 2013: 11)

### **2.3.2 Penyebab Kemiskinan**

Menurut Bahagia (2020), terdapat banyak hal yang membuat orang menjadi jatuh miskin. Namun, tidak ada jawaban yang mampu untuk menjelaskan mengapa seseorang menjadi miskin secara sekaligus. Fenomena ini ditunjukkan dengan beragamnya pendapat yang mencoba mencari sebab dari kemiskinan. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan wilayah, potensi alam, dan maupun kondisi tertentu saat mencoba mencari penyebab kemiskinan. Subandi (2014:78), mengidentifikasi tiga penyebab kemiskinan. Menurut mereka, tiga hal tersebut adalah:

- 1) Secara mikro, kemiskinan timbul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang membuat distribusi pendapatan menjadi timpang;
- 2) Munculnya kemiskinan disebabkan karena perbedaan kualitas SDM;
- 3) Adanya perbedaan dalam mengakses modal.

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan diantaranya ialah:

- 1) Perbedaan letak geografis, penduduk, dan pendapatan.

- 2) Perbedaan sejarah, terutama penjajahan oleh negara yang berlainan.
- 3) Perbedaan SDA dan SDM.
- 4) Perbedaan negara dan swasta.
- 5) Perbedaan struktur industri.
- 6) Perbedaan tingkatan, ketergantungan pada kekuatan ekonomi, dan politik negara lain.
- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negara (Limbong, 2011: 218).

Menurut Bahagia (2020), kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Penyebab kemiskinan terdiri dari:

- 1) Gagal dalam perolehan hak milik, terutama tanah dan modal;
- 2) Ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana, dan prasarana yang jumlahnya terbatas;
- 3) Kebijakan pembangunan yang menyimpang perkotaan;
- 4) Terdapat perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
- 5) Adanya perbedaan SDM dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- 6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
- 7) Tidak adanya *good governance*;

- 8) Pengelolaan SDA yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Kemiskinan adalah salah satu dari banyaknya masalah yang sulit untuk didefinisikan dan dijelaskan. Secara umum kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu, dimensi kekayaan, dan dimensi non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi *income* atau kekayaan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah biasanya bersifat sementara, selain itu, juga diukur melalui kepemilikan harta kekayaan seperti lahan bagi petani kecil, dan melalui akses jasa pelayanan publik. Sedangkan dari dimensi non-keuangan ditandai dengan adanya keputusasaan atau ketidakberdayaan yang juga dapat menimpa berbagai rumah tangga berpenghasilan rendah (Bahagia, 2020: 15).

Sehubungan dengan kondisi kemiskinan dan tidak semakin meluas, maka pemerintah pusat atau daerah harus merumuskan serangkaian kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar dalam hal pembangunan serta menjadi pusat perhatian untuk ditanggulangi. Menurut Todaro dan Stephen (2011), mengungkapkan bahwa realisasi potensi manusia merupakan konsep atau tujuan yang diangkat dari pertimbangan nilai subjektif “tentang apa yang baik, tentang apa yang diinginkan, dan tentang apa yang tidak diinginkan”. Misalnya keadilan ekonomi, sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan masyarakat lainnya. Pendekatan ini dianggap cukup mapan dalam menanggulangi kemiskinan, salah

satunya dengan menciptakan aktivitas perekonomian di daerah dan di pedesaan. Ditandai dengan kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi serta memanfaatkan dari pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebar ke seluruh unsur dalam masyarakat (Bahagia, 2020: 15).

### **2.3.3 Pengentasan Kemiskinan**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pengentasan Kemiskinan, yang dimaksud dengan program pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Menurut Apriyanti (2011), pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang mengentaskan kemiskinan, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, yang di mana disertai dengan dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah. Otonomi daerah memungkinkan peningkatan dalam pengentasan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Di samping itu, juga peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa. Berbagai rumusan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan dan

diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selain itu dalam mengentaskan kemiskinan yang kemudian menjadi suatu aspek pembangunan yang tidak bisa dipisahkan, karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak secara langsung dapat mengurangi kemiskinan tetapi malah sebaliknya seperti terjadi adanya tingkat ketimpangan dan kesenjangan yang semakin tinggi.

Menurut Apriyanti (2011), pengentasan kemiskinan melalui kebijakan pemerintah pusat yang di masa lalu telah menunjukkan berbagai kelemahan, di antara lain seperti:

- a. Masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan;
- b. Kebijakan yang bersifat sentralistik;
- c. Lebih bersifat karikatif daripada transformatif;
- d. Memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek;
- e. Orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, dan
- f. Cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada.

Dalam hal itu, disebabkan oleh beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Apriyanti

(2011), dapat digolongkan (3) tiga kelompok, yaitu; (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin; (2) kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran; dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

#### **2.4 Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Azis (2019), secara umum konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Menurut Azis (2019), ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan atau kekuatan, penjelasan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Kebebasan yang dimaksud bisa menciptakan organisasi itu sendiri melalui fasilitas pemerintah.
- 2) Menjangkau dan memiliki sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.



- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Aziz (2019), ada tiga upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

1. Menciptakan keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), dalam hal ini tolak ukurnya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali lemah atau tanpa daya. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu tersebut, mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran seseorang akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk lebih baik.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dalam hal ini dibutuhkan langkah positif, selain dari menciptakan keadaan masyarakat. Di samping itu, dilakukan perekrutan yang meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Usaha atau upaya pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti, modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Masukan pemberdayaan menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, irigasi, jalan, listrik, jembatan, maupun sekolah dan fasilitas kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, kesediaan lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan. Di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umu yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh pada lapisan masyarakat ini.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang keberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan sekumpulan aktivitas untuk memperkuat atau memajukan seseorang yang lemah untuk mempengaruhi kehidupannya, mempertahankan kekuasaan bisa mempengaruhi kehidupan yang seseorang yang diperhatikan. Singkatnya, mereka yang sudah memiliki potensi atau keberdayaan sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, fisik, ekonomi dan sosial.

## **2.5 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu wadah pemberdayaan masyarakat yang tujuan membangun kemampuan masyarakat miskin, mengentaskan kemiskinan, kemandirian dan

mengembangkan potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Secara ekonomi sosial, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi tempat hubung interaksi masyarakat-masyarakat kurang mampu untuk bisa keluar dari kemiskinan.

Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masyarakat yang dikategorikan miskin dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah pribadi dan kelompok secara timbal balik. Sehingga akhirnya memikat dan martabat kemanusiaan mereka, baik secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan dalam kelompok, memberi kekuatan untuk menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring, membuka peluang mengakses (Wardianti, 2019: 59).

Menurut Wardianti (2019), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam meningkatkan pendapatan), memotivasi keluarga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta memperkuat budaya kewirausahaan. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan saran prasarana ekonomi.

Adapun beberapa penjelasan dalam pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama, sebagai berikut:

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Dalam Pasal 1**

Bahwa dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

5. Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
6. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
7. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat dengan UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

#### **Dalam Pasal 2**

Bahwa KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

### **BAB II PEMBENTUKAN KUBE**

#### **Dalam Pasal 3**

- (1) KUBE dibentuk dengan kriteria:
  - a. Mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
  - b. Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama; dan

- c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (2) Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
- (3) KUBE memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (4) Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.

**Dalam Pasal 4**

- (1) Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpengcil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Rujukan program; dan
  - b. Nonrujukan program.
- (3) Rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari sasaran keluarga miskin yang:
  - a. Mendapatkan pelayanan melalui program keluarga harapan baik yang sudah graduasi maupun yang transisi;
  - b. Sudah mendapatkan pelayanan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpengcil; dan
  - c. Sudah mendapatkan program bantuan sosial lainnya.
- (4) Nonrujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari sasaran keluarga miskin yang diusulkan

oleh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, serta telah diverifikasi dan direkomendasi pemerintah kabupaten/kota.

### **Dalam Pasal 5**

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
- b. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
- c. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- d. Memiliki potensi dan keterampilan; dan
- e. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis atau pemegang kartu penerima bantuan sosial.

### **Dalam Pasal 6**

- (1) Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
- a. Telah meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak aktif secara permanen;
  - d. Pindah ke kecamatan lain;
  - e. Tidak menaati aturan dalam kelompok;
  - f. Sakit permanen; dan
  - g. Melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



- (2) Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Pendamping KUBE.

### **Dalam Pasal 7**

- (1) Anggota KUBE mempunyai hak:
- a. Memilih/dipilih menjadi pengurus;
  - b. Mengemukakan pendapat dan gagasan;
  - c. Mengelola usaha dan/atau kegiatan;
  - d. Mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
  - e. Menerima bagian dari hasil usaha; dan
  - f. Ikut merumuskan aturan kelompok.
- (2) Anggota KUBE berkewajiban:
- a. Mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
  - b. Menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
  - c. Memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif;
  - d. Aktif dalam proses usaha KUBE ;
  - e. Membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
  - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - g. Menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

## **BAB III PENDAMPING KUBE**

### **Dalam Pasal 8**

- (1) Petugas pelaksana pendamping KUBE meliputi :
  - a. Supervisor;
  - b. Koordinator; dan
  - c. Pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) bertugas mengoordinasikan koordinator dalam Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) bertugas mengoordinasikan pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis dalam wilayah kecamatan.
- (4) Pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.

### **Dalam Pasal 9**

- (1) Pendamping KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (4) berasal dari:
  - a. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
  - b. Pekerja sosial masyarakat;
  - c. Karang taruna;
  - d. Pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  - e. Tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.

- (2) Selain pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping KUBE dapat berasal dari:
- a. Pendamping PKH; atau
  - b. Pendamping KAT.

**Dalam Pasal 10**

- (1) Rekrutmen Pendamping KUBE dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon I yang menangani KUBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendamping KUBE diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

**IV BANTUAN SOSIAL DAN PEMANFAATAN**

**Dalam Pasal 11**

- (1) Bantuan Sosial KUBE berupa uang atau barang digunakan untuk kegiatan UEP.
- (2) Besarnya jumlah Bantuan Sosial KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah anggota KUBE.

**Dalam Pasal 12**

- (1) Bantuan Sosial dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
- (2) Pemanfaatan dana Bantuan Sosial UEP oleh KUBE, dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.

- (3) Pemanfaatan dana Bantuan Sosial hanya digunakan untuk UEP dan tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal lainnya yang tidak terkait dengan produktivitas KUBE.

## **BAB V MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN BANTUANSOSIAL**

### **Dalam Pasal 13**

Permohonan Bantuan Sosial KUBE dapat diajukan oleh:

- a. Masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
- b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

### **Dalam Pasal 14**

Permohonan Bantuan Sosial KUBE yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) huruf (a) dilakukan dengan mekanisme:

- a. Mengusulkan proposal KUBE kepada dinas sosial kabupaten/kota;
- b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi serta seleksi calon penerima Bantuan Sosial dengan melibatkan Pendamping KUBE;
- c. Dinas Sosial Kabupaten/Kota merekomendasikan proposal kepada Kementerian Sosial dengan tembusan Dinas Sosial Provinsi;
- d. Unit kerja eselon I yang menangani KUBE melakukan verifikasi; dan

- e. Berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan penerima Bantuan Sosial dengan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

### **Dalam Pasal 15**

Permohonan Bantuan Sosial KUBE yang diajukan oleh dinas sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui mekanisme:

- a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan permohonan bantuan sosial KUBE kepada Kementerian Sosial dengan dilengkapi data nama dan alamat penerima Bantuan Sosial dan tembusan disampaikan kepada dinas sosial provinsi;
- b. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan antarnegara melakukan verifikasi berdasarkan usulan Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- c. Instansi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam menerima Bantuan Sosial KUBE harus menandatangani surat keterangan bertanggung jawab mutlak bermaterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah).

## **BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN**

### **Pasal 16**

- (1) Keberhasilan KUBE diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek indikator:
  - a. Kelembagaan;

- b. Sosial; dan
- c. Ekonomi.

(2) Indikator keberhasilan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 17**

Sumber pendanaan KUBE dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Dana hibah dalam negeri; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **Dalam 18**

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan KUBE.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan KUBE.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara rutin.

#### **Dalam Pasal 19**

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KUBE.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan KUBE.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

### **Dalam Pasal 20**

- (1) Laporan disampaikan ketua kelompok KUBE kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon I yang menangani KUBE dengan tembusan kepada dinas/instansi sosial provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan keuangan; dan
  - b. Laporan pelaksanaan KUBE.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) merupakan laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dengan melampirkan:
  - a. Berita acara serah terima;
  - b. Realisasi rencana anggaran biaya;
  - c. Kuitansi dan faktur; dan
  - d. Fotocopy buku tabungan;
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.



- (5) Laporan pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Aspek sosial;
  - b. Aspek kelembagaan manajemen; dan
  - c. Perkembangan usaha.
- (6) Laporan pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan kalender setelah bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

## **BAB IX PENGHARGAAN**

### **Dalam Pasal 21**

KUBE dan Pendamping KUBE yang berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dana pembinaan untuk menambah modal KUBE.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Dalam Pasal 22**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2015  
ditandatangani Oleh Menteri Sosial Republik Indonesia,  
Khofifah Indar Parawansa. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11  
Januari 2016, oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-

Undang-Undang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertandatangani Widodo Ekatjahjana.

Berdasarkan penjelasan peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di rincikan atas nilai dan norma budaya setempat, dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di lingkungan masyarakat, serasi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Selain itu, juga didampingi oleh dinas terkait pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di daerah. Dengan merujuk pada peraturan diharapkan kelompok mempunyai integritas dalam membangun, membina, dan penyaluran bantuan tersebut.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti ketahui mengenai peran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun/Tempat	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Haryati R. (2013). Cawang III Jakarta Timur	Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	KUBE Kebijakan	Pendekatan evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Mengulas kebijakan pengentasan kemiskinan melalui KUBE.	Mengulas peran program KUBE dalam mengentaskan kemiskinan, serta pandangan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan.	Sasaran KUBE tidak sesuai dengan kriteria BPS (14 kriteria penduduk miskin), proses pelaksanaan, belum seluruh tahapan dilaksanakan

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama/Tahun /Tempat	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
						n secara runtut.
2	Diana, Elita. (2015) Mataram	Peran Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Bambu (Bambussa Spp) Di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.	KUBE Pendapatan	Metode kualitatif deskriptif, mengulas peran KUBE serta melihat aspek terhadap pelaksanaan.	Mengulas peran program KUBE dalam mengentaskan kemiskinan, serta pandangan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan.	Tidak efektif, peran KUBE terdapat kekurangan, Peralatan modern dalam pengolahan kerajinan dan minim pendidikan.
3	Diah Ayu Ningrum (2017). Yogyakarta	Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan di KUBE Sejahtera Desa Giripurno, Ngadirejo, Temanggung.	KUBE Kemiskinan	Metode kualitatif deskriptif, mengulas tentang peranan program KUBE	Mengulas peran program KUBE dalam mengentaskan kemiskinan, serta pandangan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan.	Belum efektif, peran KUBE sudah mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat, tetapi dalam pengurus rendahnya pendidikan.
4	Muhammad Fahrozi (2020) Mataram	Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube-Fm) di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur	KUBE-FM Kesejahteraan	Metode kualitatif deskriptif, mengulas tentang efektivitas program KUBE	Mengulas peran program KUBE dalam mengentaskan kemiskinan, serta pandangan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan.	Pelaksanaan program KUBE Sakra belum efektif.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama/Tahun /Tempat	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
5	Sri Yuni, et al. (2015) Yogyakarta	Kinerja Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam Peningkatan Kemiskinan	KUBE Kemiskinan	Metode kualitatif deskriptif. Mengulas implementasi kinerja KUBE dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.	Mengulas peran program KUBE dalam mengentaskan kemiskinan, serta pandangan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan.	Aspek sosial, bernilai baik dan tiga kube bernilai kurang. Aspek ekonomi satu kube bernilai baik. Aspek kelembagaan, satu kube bernilai baik dan tiga kube bernilai cukup serta empat Kube bernilai kurang.
6	Fenni Rifka Simbolon (2020). Medan	Peranan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penerima KUBE di Desa Paindoan, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.	KUBE Kesejahteraan	Metode kualitatif deskriptif, mengulas tentang peranan program KUBE.	Mengulas peran program KUBE dalam mengentaskan kemiskinan, serta pandangan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan.	Kurang efektif karena dua dari tiga indikator tidak terpenuhi, tapi kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan.
7	Meilisa Twin Nabila (2020). Ponorogo	Peran Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kemandirian	KUBE Kesejahteraan	Metode kualitatif deskriptif, mengulas tentang peranan program KUBE	Mengulas peran program KUBE dalam mengentaskan kemiskinan, serta pandangan kebijakan dalam	Peran KUBE sudah cukup baik dan sudah memiliki tahapan program.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama/Tahun /Tempat	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
		n Ekonomi (Studi Kasus Program Keluarga Harapan Desa Wringinano m,Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo).			mengentaskan kemiskinan.	

## 2.7 Kerangka Berpikir

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat dasar dalam pengentasannya, maka dari itu dibutuhkan suatu upaya pemberdayaan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan di daerah pedesaan. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh beberapa sebab seperti, keterbatasan masyarakat dalam mengakses barang publik, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi, dan kurangnya pendanaan dari birokrat. Adapun faktor internal yang menyebabkan kemiskinan kepadatan penduduk, pengangguran terbuka, sifat kemalasan seseorang itu sendiri, mental, dan budaya seseorang itu sendiri.

Berdasarkan upaya dan usaha yang sudah dilakukan oleh dilakukan oleh pemerintah adalah dengan merumuskan kebijakan kesejahteraan atau program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga sosial di daerah. Namun, dalam hal ini dibutuhkan kinerja yang mampu mengentaskan kemiskinan dilingkungan, karena pemberdayaan yang secara teknis sementara hanya mampu bertahan sementara dan menghabiskan dana saja,

tetapi dibutuhkan upaya penuh dengan pengarahan, pelatihan, dan bimbingan ke tingkat nasional. Agar masyarakat yang mendapat pemberdayaan mampu menjelaskan ke masyarakat lain, serta dapat memimpin kelompok pemberdayaan yang mumpuni di tingkat daerah tersebut.

Demikian sebuah kebijakan program dari pemerintah yang telah dipertimbangkan dalam penyusunan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan, juga dapat di analisis dari pelaksanaan sebuah program tersebut serta meliputi efektif atau tidaknya sebuah program yang telah jalannya, maka hendaknya dapat di evaluasi dan perbaikan sejumlah pelaksanaan tersebut agar dapat tercapainya sebuah program tersebut seperti yang dikehendaki dalam mengentaskan kemiskinan. Guna mempermudah maksud penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

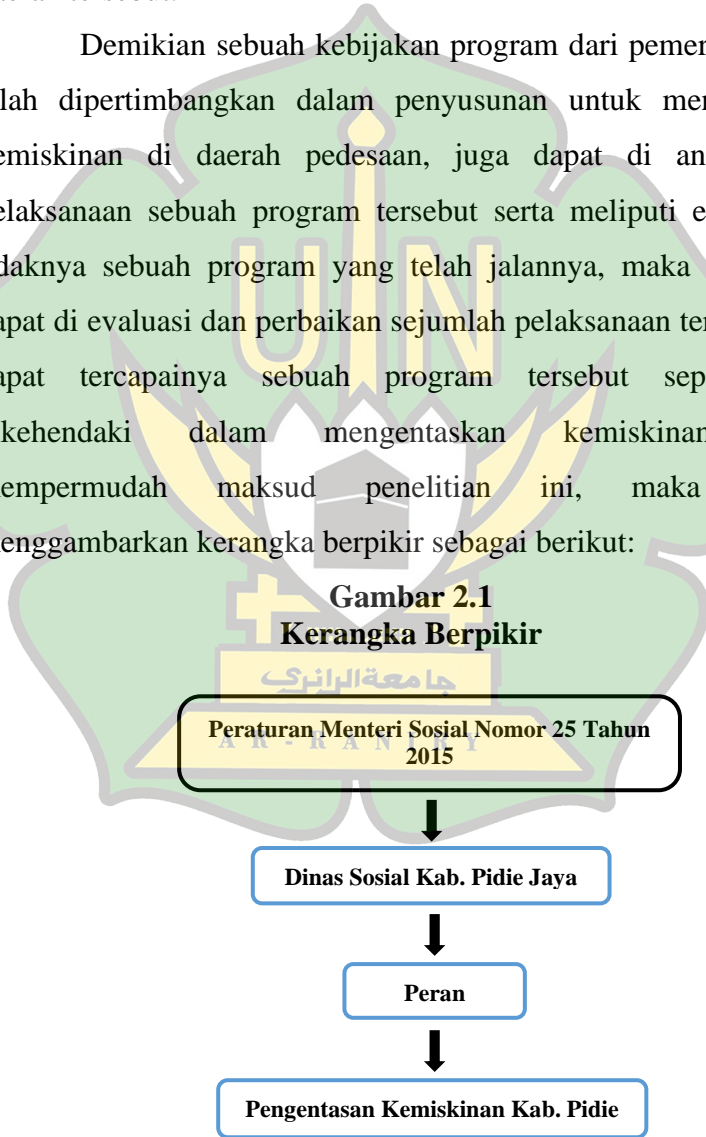
**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun  
2015

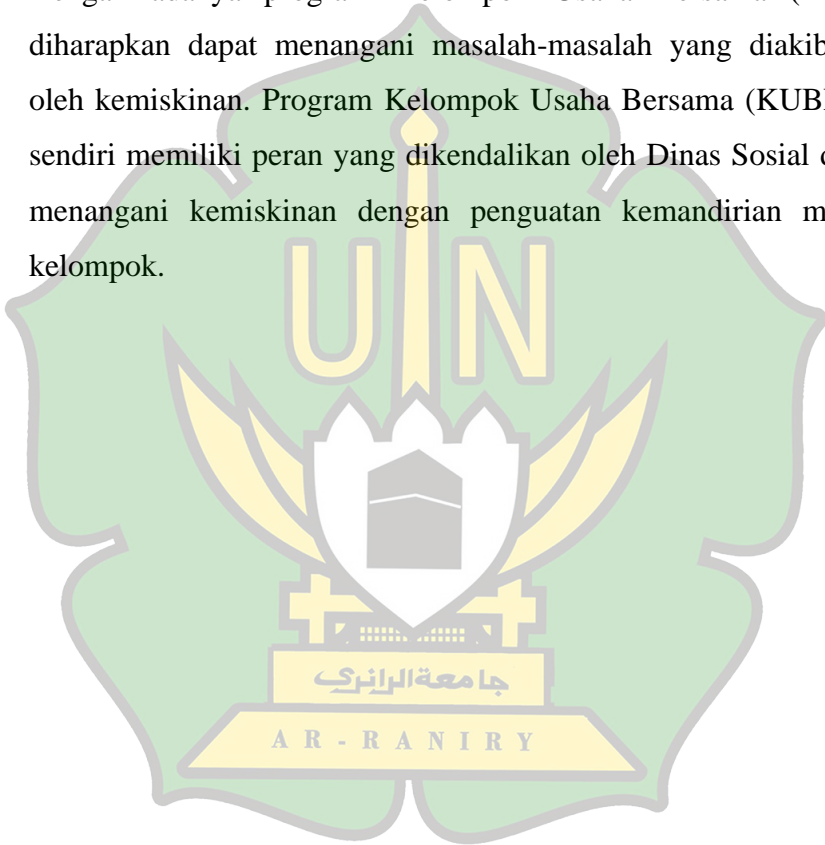
Dinas Sosial Kab. Pidie Jaya

Peran

Pengentasan Kemiskinan Kab. Pidie



Berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan, seperti sedikitnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan rendah, banyaknya pengangguran, biaya hidup semakin meningkat serta masih banyak lagi permasalahan kemiskinan. Dengan adanya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diharapkan dapat menangani masalah-masalah yang diakibatkan oleh kemiskinan. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) itu sendiri memiliki peran yang dikendalikan oleh Dinas Sosial dalam menangani kemiskinan dengan penguatan kemandirian melalui kelompok.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*), alasan menggunakan pendekatan ini karena penelitian ini bersifat terbuka. Selain itu, juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat mencari suatu masalah secara mendalam, serta menggambarkan hipotesis dengan tulisan. Metode ini biasanya mulai dengan membahas suatu kasus tertentu serta memiliki arti yang sangat penting (Raco, 2010: 50).

Pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang peran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti berharap mendapatkan hasil penelitian yang valid serta mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan jelas.

#### **3.2 Informan Penelitian**

Raco (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sampel dikenal dengan informan atau partisipan yang memberikan masukan terhadap suatu masalah. Istilah sampel juga dikenal sebagai subjek dan objek yang bertujuan untuk menghasilkan

gambaran dari suatu kasus penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa kriteria dan alasan tertentu diantaranya:

1. Jumlah KUBE secara keseluruhan adalah 60 kelompok dari delapan Kecamatan di Pidie Jaya, dikarenakan jumlah populasinya yang sangat luas, maka dipertimbangkan akan diambil satu KUBE per Kecamatan untuk mewakili informan
2. Ketentuan pemilihan informan mencakup semua jenis usaha, sehingga dapat mewakili semuanya.
3. Kriteria pemilihan sampel diambil pada jenis usaha yang dianggap memang masih berkembang hingga saat ini meskipun masa pandemic Covid-19.
4. Selajutnya untuk memperkuat data penelitian, maka kelompok Dinas Sosial juga dilakukan wawancara beberapa orang untuk mewakili.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti mampu mendeskripsikan masalah yang diteliti secara akurat dan mencari suatu keterangan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya, maka peneliti menetapkan informan di sini (Dinas Sosial, ketua kelompok, dan anggota) agar mendapatkan data yang mendalam serta menghindari terjadi informasi yang tumpah-tindih. Adapun

beberapa informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	KABID Dinas Sosial	1
2	KUBE Kecamatan Bandar Baru	2
3	KUBE Kecamatan Panteraja	2
4	KUBE Kecamatan Trienggadeng	2
5	KUBE Kecamatan Meuredu	2
6	KUBE Kecamatan Meurah Dua	2
7	KUBE Kecamatan Ulim	2
8	KUBE Kecamatan Jangka Buya	2
9	KUBE Kecamatan Bandar Dua	2
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

### 3.3 Sumber Data

Menurut Raco (2010), dalam penelitian kualitatif sumber data berupa teks atau penulisan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun data dari hasil penelitian didapatkan oleh peneliti melalui dua sumber yaitu:

- 1) Data primer yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas sosial, ketua kelompok-kelompok (KUBE), dan anggota pengurus. Teknik wawancara yang dilaksanakan dengan cara

melakukan tanya jawab langsung untuk mendapatkan keterangan mengenai hal-hal dalam penelitian.

- 2) Data sekunder yaitu data pelengkap dalam penelitian ini yang diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, artikel, dan internet yang berhubungan dengan peran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Raco (2010) penelitian kualitatif alat pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Selain itu. Selama penelitian ini berlangsung pencatatan data sangat penting peneliti gunakan, teknik pencatatan lapangan berisi hasil wawancara selama observasi dengan bahasa objektif, serta alat yang digunakan oleh peneliti adalah berupa buku catatan dan alat bantu lainnya.

Ada beberapa teknik menurut Raco (2010) yaitu; observasi, wawancara dan dokumen. Penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti dan dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran. Kemudian peneliti mengidentifikasi sasaran yang di observasi, merekam sasaran dan melindungi hasil yang sudah direkam. Peneliti tidak

hanya sekedar tumpang lewat, sehingga kualitas suara informan tetap terjamin karena akan diputarkan kembali atau didengarkan berkali-kali untuk di analisis (Raco, 2010: 112).

Dalam tahap ini, teknik observasi yang digunakan oleh peneliti dengan pengamatan langsung di lapangan agar mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya terjadi, dan menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Peneliti akan mengajukan pertanyaan untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu kasus, dan realita yang terjadi. Dalam wawancara tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga menangkap pengertian tentang pengalaman hidup orang lain, dan hal ini hanya dapat diperoleh keterangan dengan *in-depth interview* (Raco, 2010: 116-117).

Tahap ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Dinas Sosial, ketua kelompok (KUBE), dan anggota pengurus agar peneliti dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai data yang diperoleh terkait dengan penelitian. Peneliti ini juga menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana sebelumnya peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancaranya terlebih dahulu dibuatkan.

### c. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan oleh peneliti untuk menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti akan melakukan pengumpulan sejumlah catatan dan mengambil beberapa gambar selama proses pengumpulan data berlangsung, dengan teknik ini peneliti berharap mendapatkan data yang valid.

### 3.5 Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah suatu upaya agar menjamin bahwa penelitian ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pengabsahan data *triangulasi* sebagai pengecekan data ulang dari berbagai sumber dan berbagai waktu. Patton (2002), menjelaskan alasan menggunakan *triangulasi* adalah bahwa tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan dapat benar-benar sempurna. Selain itu, keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu (Raco, 2010: 111).

Demikian dalam penelitian ini ditempuh dengan cara pengecekan ulang dan perbandingan hasil yang diperoleh saat observasi terkait dengan penelitian, wawancara, dan dokumen. Dengan hasil perbandingan tersebut peneliti berharap mendapatkan titik terang dan bisa memberi masukan kepada Dinas Sosial dan Kelompok Usaha Bersama (KIBE) dalam mengoptimalkan

pelaksanaan, serta dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.

### 3.6 Teknik Analisis Data

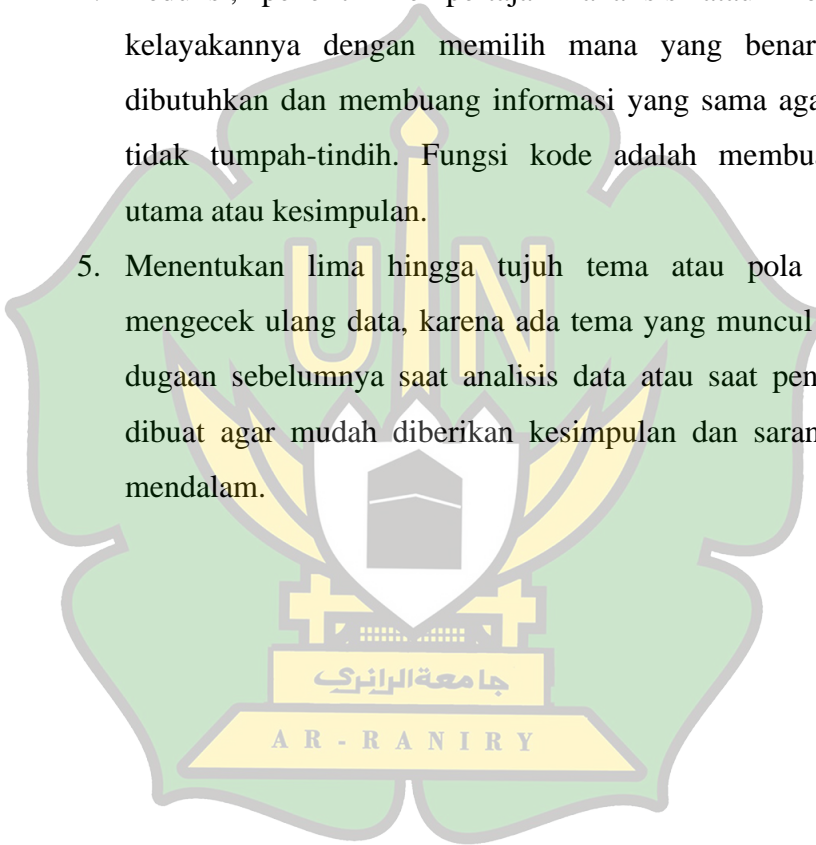
Analisis data merupakan tujuan untuk menghasilkan suatu pemikiran dan pendapat, dengan mengatur hasil, observasi, wawancara, dan dokumen. Dalam *findings* berupa mencari dan menemukan tema, pola, konsep, (*insights dan understanding*), membuat penegasan yang memiliki arti (*statement of meanings*). Peneliti akan mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, dan mencari pola atau tema-tema yang sama serta analisis dan penafsiran berjalan seiring (Raco, 2010: 121-122).

Menurut Raco (2010), cara pengkodean menganalisis data yang peneliti lakukan adalah, sebagai berikut:

1. Peneliti akan mengumpulkan data selama penelitian berlangsung dan mencari arti keseluruhan secara mendalam dari data yang sudah diperoleh sebelum atau sesudah melakukan penelitian di lapangan. Data yang didapatkan peneliti dari hasil, observasi, wawancara, dokumen, ada beberapa sumber lainnya. Semua data akan dikumpulkan menjadi satu file.
2. Upaya mempertanyakan kembali atau mencari arti yang terkandung dalam informasi yang sudah di kelompokkan.



3. Membuat catatan setiap pada statement, mengkodekan setiap pemilihan topik sesuai dengan *setting*, dan konteks. Peneliti menangkap cara berpikir partisipan, proses, aktivitas, strategi, hubungan, dan struktur sosial.
4. Reduksi, peneliti mempertajam analisis atau mengkaji kelayakannya dengan memilih mana yang benar-benar dibutuhkan dan membuang informasi yang sama agar data tidak tumpah-tindih. Fungsi kode adalah membuat ide utama atau kesimpulan.
5. Menentukan lima hingga tujuh tema atau pola untuk mengecek ulang data, karena ada tema yang muncul diluar dugaan sebelumnya saat analisis data atau saat penelitian dibuat agar mudah diberikan kesimpulan dan saran yang mendalam.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pidie Jaya mempunyai sejarah yang panjang di mana sebelumnya dikenal dengan sebutan “Negeri Meureudu” terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan (daerah bebas dari aturan kerajaan), kewajiban Meureudu pada saat itu hanya menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan Kerajaan Aceh. Bahkan pada saat kerajaan Aceh berperang melawan penjajahan Belanda mengalami kemunduran dan runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas. Selain itu, perjalanan Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (Malaysia) tahun 1613, menempatkan diri singgah di Meureudu dan menjumpai Teungku Muhammad Jalaluddin yang terkenal dengan sebutan Tgk. Ja Madainah, karena Meureudu memegang peranan penting dalam percaturan politik Kerajaan Aceh. Hal tersebut sebagaimana dalam Qanun al-Asyi atau Adat Meukuta Alam yang merupakan Undang-undang Kerajaan Aceh. Saat sebagian Aceh dikuasai Belanda dan merebut Masjid Indra Puri, dokumen Undang-Undang Kerajaan Aceh jatuh ke tangan Belanda. Kemudian oleh K.F Van Hangen dokumen itu diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)).

Dalam pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, Apabila uleebalang dalam negeri tidak mematuhi hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu untuk memberhentikan uleebalang atau diusir. Kutipan undang-undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerajaan Aceh Darussalam. Bahkan Pada masa kegemilangannya Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibukota erajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya Ibukota Kejaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah didirikan Sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)).

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke Semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai panglima perang, serta Teungku Ja Pakeh putra Meureudu sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang. Setelah Semenanjung

Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan Pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu (putra bungsu dari Meurah Ali Taher) bernama Meurah Ali Husein sebagai perpanjangan tangan sultan di Meureudu (id.wikipedia.org).

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa definitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bernama Meurah Johan Mahmud yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu. Sejak Meurah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meureudu telah diperintah oleh sembilan Teuku Chik, dan selama penjajahan Belanda, Landschap Meureudu telah diperintah oleh tiga orang Teuku Chik (*Zelfbestuurders*). Pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu diubah menjadi Kewedanan (*Orderafdeeling*) yang diperintah oleh seorang Controlleur. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang Controlleur, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja. Namun, kemudian setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan

Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Pada masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang Suntyo Meureudu Sun dan Seorang Guntyo Meureudu Gun (id.wikipedia.org).

Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kawedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai kawedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana. Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada di bawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Kini daerah Kawedanan Meureudu menjelma menjadi Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibukotanya (id.wikipedia.org).

#### **4.1.2 Profil Kabupaten Pidie Jaya**

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, dengan ibukotanya Meureudu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya juga merupakan salah satu dari 16 usulan pemekaran kabupeten/kota yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 8 Desember 2006.

Kabupaten Pidie Jaya pernah dilanda musibah gempa bumi berkekuatan 6,5 Mw pada tanggal 7 Desember 2016, pukul 5.03.36 WIB. Pusat gempa berada di koordinat 5,25 LU dan 96,24 BT,

tepatnya 2 kilometer utara Meureudu pada kedalaman 15 km, gempa yang berada di daratan menyebabkan gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami. Namun, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedikitnya 104 orang meninggal dunia akibat gempa ini (id.wikipedia.org).

Berdasarkan dalam buku Pidie Jaya Dalam Angka tahun 2021, letak geografisnya berada pada  $4^{\circ}54'15,702''N$  sampai  $5^{\circ}18'2,244''N$  dan  $96^{\circ}1'13,656''E$  sampai  $96^{\circ}22'1,007''E$ . Topografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0 mdpl sampai 2300 mdpl dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%. Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari (8) Kecamatan dan (222) gampong (desa) adalah sebagai berikut:

1. Meureudu: Luas wilayah  $124,79 \text{ Km}^2$
2. Meurah Dua: Luas wilayah  $287,07 \text{ Km}^2$
3. Bandar Dua: Luas wilayah  $174,32 \text{ Km}^2$
4. Jangka Buya: Luas wilayah  $9,35 \text{ Km}^2$
5. Ulim: Luas wilayah  $41,75 \text{ Km}^2$
6. Trienggadeng: Luas wilayah  $79,37 \text{ Km}^2$
7. Panteraja: Luas wilayah  $15,00 \text{ Km}^2$
8. Bandar Baru: Luas wilayah  $220,47 \text{ Km}^2$

Adapun beberapa batasan yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan batasan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan dengan batasan Kabupaten Pidie
3. Sebelah Barat dengan batasan Kabupaten Pidie







Pidie Jaya, bahwa total wilayah Pidie Jaya adalah 1.162,84 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas wilayah darat 952,0 km<sup>2</sup> (95.210,99 Ha berdasarkan GIS) dan luas wilayah laut 210,84 km<sup>2</sup>.

Letak Geografis Kabupaten Pidie Jaya terletak antara 96°3'16,62" sampai dengan 96°20'40,5" Bujur Timur dan 5°18'6,607" sampai dengan 4°56'42,1" Lintang Utara. Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 kecamatan, 34 Mukim, dan 222 Gampong. Batas-batas wilayahnya pada sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Kabupaten Pidie (Kecamatan Kembang Tanjong). Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane). Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Geuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro, dan Kecamatan Keumbang Tanjong).

Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya merupakan satuan kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, di mana perangkat daerah dalam melaksanakan otonomi daerah Provinsi Aceh dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal (1) angka (10) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya memiliki fungsi sebagai perumusan, pelaksanaan, evaluasi tentang kebijakan bidang rehabilitasi, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan segala segala sesuatu fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Pasal (21) dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya menyatakan bahwa bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang indentifikasi, penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, kelembangaan dan restorasi sosial, pendampingan, bantuan stimulasi dan penataan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan visi Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, yang diarahkan pembangunan dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **4.2 Kependudukan Pidie Jaya**

Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya terus berkembang seiring dengan perkembangan dan modernisasi daerah. Di samping itu, transisi penduduk Aceh setelah perdamaian (konflik Aceh dengan Pemerintahan Indonesia) meningkat, di mana telah memberi perubahan dalam kependudukan Aceh khususnya di Kabupaten Pidie Jaya. Kependudukan di Kabupaten Pidie Jaya antara masyarakat dari daerah pesisir timur maupun masyarakat

diluar daerah Aceh. Di samping itu, urbanisasi yang telah memberi gambaran perubahan pada tatanan Kabupaten Pidie Jaya, seperti gambaran perubahan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan gambaran lingkungan gaya hidup masyarakat Pidie Jaya saat ini. Pertumbuhan pembangunan Kabupaten dalam Provinsi Aceh terus meningkat sehingga memberikan pandangan pada masyarakat di luar Kabupaten Pidie Jaya memutuskan menetap.

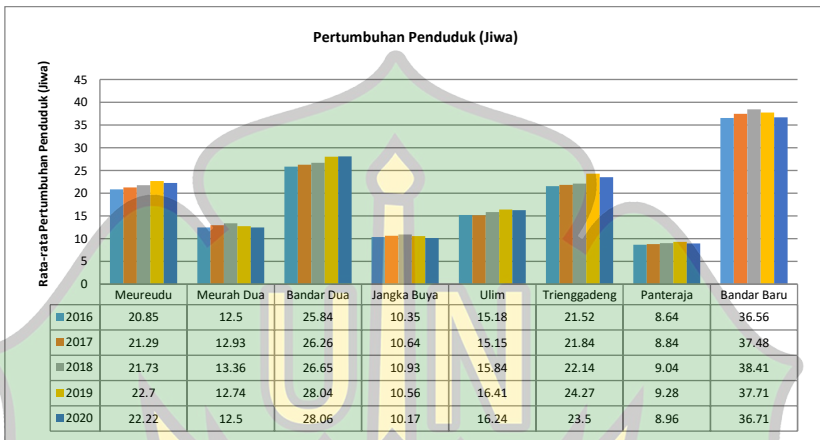
#### **4.2.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk**

Seiring dengan program peningkatan pembangunan tentu membari perubahan pada pertumbuhan penduduk sehingga meningkatnya kepadatan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah atau pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, hal tersebut terjadi karena adanya akibat kelahiran dan kematian di setiap waktu. Selain itu, pertambahan penduduk juga disebabkan oleh urbanisasi dan akhirnya menyebabkan kepadatan penduduk. Todaro dan Stephen (2011) dalam Bahagia (2020), sebagian besar dari demografi modern lebih cenderung memilih kota-kota berkembang untuk bertahan hidup dan dipengaruhi oleh pembangunan daerah dan pendapatan perkapita suatu wilayah. Maka dari itu, dengan berkembangnya Kabupaten Pidie Jaya sekarang memberikan pengaruh untuk masyarakat lain di luar Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan dalam buku publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie Jaya Dalam Angka tahun (2021), bahwa jumlah penduduk Pidie Jaya pada tahun (2020) meningkat dengan

jumlah sebesar (158,397) jiwa. Berikut adalah data jumlah pertumbuhan Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Kecamatan.

**Gambar 4.2**  
**Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan terjadi trend peningkatan pertumbuhan penduduk Kabupaten Pidie Jaya, di mana puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2020 sebesar (158,36 jiwa) dengan rata-rata (1,13) persen laju pertumbuhan. Diantaranya, Kecamatan Meureudu dengan pertumbuhan penduduk sebesar (22,22 jiwa), Kecamatan Meurah Dua dengan pertumbuhan penduduk sebesar (12,50 jiwa), Kecamatan Bandar Dua dengan pertumbuhan penduduk sebesar (28,06 jiwa), Kecamatan Jangka Buya dengan pertumbuhan penduduk sebesar (10,17 jiwa), Kecamatan Ulim dengan pertumbuhan penduduk sebesar (16,24 jiwa), Kecamatan Trienggadeng dengan pertumbuhan penduduk sebesar (23,50 jiwa), Kecamatan Panteraja dengan pertumbuhan

penduduk sebesar (8,96 jiwa), dan Kecamatan Bandar Baru dengan pertumbuhan penduduk sebesar (36,71 jiwa).

#### **4.2.2 Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan**

Pembangunan daerah tidak terlepas dari suatu kondisi kemiskinan dan kesejahteraan, karena pembangunan suatu kota yang berkembang cenderung terdapat kesenjangan dan ketimpangan dalam langkah-langkah pembangunan. Menurut Todaro dan Stephen (2011), dalam menilai kesuksesan pembangunan suatu daerah adalah kesuksesan dalam menekan kemiskinan, karena pada dasarnya cerminan suatu pembangunan daerah tidak hanya dinilai dari pembangunan fisik saja, tetapi lebih dari itu. Oleh karena itu, kesejahteraan penduduk yang menjadi prioritas utama dalam kesuksesan pembangunan. Di samping itu, dilihat juga terhadap kepekaan suatu kebijakan yang prioritas pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber daya Alam (SDA) setempat. Artinya, terwujudnya sebuah kesejahteraan dengan kemandirian masyarakat itu sendiri, serta perlu dukungan kebijakan karena kebijakan selalu membuka langkah untuk kemandirian masyarakat terhadap pengembangan SDA.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya disebabkan oleh kemiskinan kultural dan struktural, hal tersebut tercermin dari perkembangan Kabupaten Pidie Jaya sebagai Kabupaten yang sedang berkembang. Di samping itu, juga disebabkan oleh perbedaan kepemilikan aset, perbedaan geografis yang menyebabkan masyarakat Pidie Jaya umumnya petani, pendidikan

rendah, dan keterbatasan lapangan pekerjaan serta keterbatasan keterampilan SDM itu sendiri dalam mencari mengisi pekerjaan, sehingga menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Pidie Jaya.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang tidak bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhannya. Dalam hal tersebut kemiskinan bisa berlangsung dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, tergantung dari kondisi kepasrahan seseorang dalam memperjuangkan hidupnya. Pindyck dalam Nuryitmawan (2016), kemiskinan sering dikaitkan dalam konsep kesejahteraan masyarakat, seperti pengukuran pendapatan atau pengeluaran. Hal tersebut menjadi cerminan bagi para ahli dalam mengemuka pendapatnya. Misalnya, pengukuran kesejahteraan yang dinilai dari standar pendapatan USD \$1 dan USD \$2 perkapital perhari, dan pengukuran kemiskinan dinilai dari konsumsi makanan berkalori minimum 2.100 perkapital perhari.

Dalam buku “Pidie Jaya Dalam Angka” tahun 2021, masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapital sebulan di bawah garis kemiskinan, sebagaimana garis kemiskinan yang ditentukan dengan teori *Foster-Greer-Thorbecke* (1984). *Head Count Index* (HCI-P0) adalah persentase masyarakat miskin yang berada di Garis Kemiskinan (GK), sedangkan (*Poverty Gap Index-P1*) atau indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.



Artinya, semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity index-P2) yang memberi gambaran tentang penyebaran pengeluaran antara setiap masyarakat miskin. Artinya, semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran setiap masyarakat miskin.

Pengukuran kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya meliputi dua garis kemiskinan. Pertama Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang di ukur melalui pengeluaran minimum makanan berkalori 2.100. Kedua Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) yang di ukur melalui kebutuhan minimal untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar hidup lainnya.

#### **4.3 Hasil Penelitian**

Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui; (a) peran pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya; (b) kebijakan pemerintah melalui Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya dan; (c) kendala dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini fokus pada beberapa KUBE saja yang dipilih secara acak atau random. Penentuan jenis usaha yang dipilih dianggap masih aktif berjalan sampai sekarang, meskipun sejak pandemic 2020 program tersebut tidak ditangani lebih lanjut oleh pihak pemerintahan. Adapun beberapa Kelompok



Usaha Bersama (KUBE) yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

No	Program KUBE	Jenis Usaha
1	KUBE Kecamatan Bandar Baru	Pembuatan kue
2	KUBE Kecamatan Panteraja	Menjahit
3	KUBE Kecamatan Trienggadeng	Anyaman tikar
4	KUBE Kecamatan Meuredu	Pembuatan kue
5	KUBE Kecamatan Meurah Dua	Jualan kios
6	KUBE Kecamatan Ulim	Bengkel las bersaudara
7	KUBE Kecamatan Jangka Buya	Menjahit
8	KUBE Kecamatan Bandar Dua	Pembuatan kue

#### **4.3.1 Peran Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya**

Pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Pidie Jaya merupakan langkah dalam mengentaskan kemiskinan di daerah, di mana setelah dan berbagai hal dalam pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menekan angka kemiskinan kurang mengatasi masalah kemiskinan. Dalam hal itu, melalui Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan

tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat miskin, pengembangan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompok sehingga mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Kelompok Usaha Bersama yang disingkat dengan disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam pelaksanaan di daerah sejalan dengan peraturan menteri tersebut mengembankan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial setempat, sebagaimana yang dimaksud bab 5, Pasal 13 poin (a) dan (b) bahwa pemohon bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diajukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten. Kemudian merujuk pada Peraturan Menteri maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Sosial Kabupaten dapat melaksanakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana yang dimaksud adalah dengan memberikan bantuan melalui program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama.

Hasil wawancara pertama dengan Bapak Agus Fauzi, S.Kep, M.K.M selaku Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya mengatakan bahwa pelaksanaan program Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) dibentuk melalui kegiatan sosialisasi atau survey ke lapangan terlebih dahulu oleh pihak dinas. Pengecekan secara langsung kondisi masyarakat pada setiap desa di seluruh Kecamatan Pidie Jaya bertujuan untuk mengetahui masyarakat yang berhak menerima bantuan melalui program Kelompok Usaha Bersama tersebut. Pemberian bantuan melalui program KUBE ini untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya. Kriteria penerima bantuan program KUBE diperoleh berdasarkan hasil survey sebelumnya. Bantuan ini diberikan secara berkelompok dengan anggota 5-10 orang. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya dalam mengentaskan kemiskinan. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Agus Fauzi, S.Kep, M.K.M) Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya, sebagai berikut:

*“Dalam menjalankan tugas dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pertama-pertama dari pihak dinas sosial melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian ada masyarakat bila memenuhi persyaratan seperti yang sudah diatur dalam peraturan akan diproses selanjutnya, hal itu dilakukan tidak tumpah-tindih. Karena banyak masyarakat menilai program ini adalah bantuan Covid-19 saat pandemi, namun sayangnya program KUBE saat sekarang sudah tidak berjalan efektif karena pertimbangan dalam yang difokuskan untuk penanganan dalam hal pandemi. Kriteria masyarakat yang ditetapkan Dinas Sosial adalah masyarakat miskin, namun yang mempunyai usaha yang terbentuk atas (5-10) anggota yang dikepalai satu ketua kelompok, bantuan tersebut diberikan setelah diverifikasi data kelompok, sedangkan bentuk*

*bantuannya adalah bersifat barang tidak dalam bentuk uang” (Agus Fauzi, Dinas Sosial, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Proses pembinaan serta pengawasan bagi anggota penerima KUBE ini dilakukan secara rutin dalam seminggu dua kali. Hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan usaha yang dibina oleh masing-masing kelompok penerima KUBE tersebut. Program KUBE ini mampu mengentaskan kemiskinan, apalagi pada masa Covid-19 setiap orang susah mencari pekerjaan. Melalui program ini sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperoleh pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Agus Fauzi, S.Kep, M.K.M selaku Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya, sebagai berikut:

*“Pengawasan dan pembinaan dari Dinas Sosial pada masyarakat yang sudah menerima manfaat dilakukan oleh tim money internal Dinas Sosial ke tempat kelompok, dalam hal pengawasan dan pembinaan dilakukan dalam seminggu dilakukan dua kali untuk mengevaluasi kelompok. Secara pertimbangan dalam beberapa tahun terakhir program KUBE yang sudah berjalan dapat mengentaskan kemiskinan tetapi tidak seluruhnya efektif, dikarenakan juga semenjak terjadi pandemi Covid-19 kemiskinan bisa diperkirakan bisa meningkat ditahun mendatang, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diluar program KUBE” (Agus Fauzi, Ketua Dinas Sosial, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara *kedua* dengan Ibu Rahmawati selaku ketua kelompok Kecamatan Bandar Baru mengatakan bahwa jenis usaha yang dibentuk dalam program KUBE ini tentang usaha pembuatan kue. Pelaksanaan program KUBE selama ini sudah

berjalan sesuai dengan harapan. Selaku ketua program KUBE selalu memberikan pengarahan atau masukan kepada para anggota dengan tujuan pembentukan program tersebut dapat memperoleh pendapatan ekonomi yang stabil. Peran kepala KUBE dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompok dengan membagikan tugas secara adil, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan harapan. Kekompakan dalam tim sangat diutamakan, karena saling bertanggung jawab dalam perkembangan program KUBE ini akan memudahkan para anggota untuk mengembangkan usaha yang dibina secara bersama. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku ketua kelompok KUBE Melati di Kecamatan Bandar Baru dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Sebagai ketua pimpinan kita harus memberikan arahan atau masukan kepada anggota supaya dengan adanya program ini kita dapat membangkitkan pendapatan ekonomi masyarakat di lingkungan tersebut. Untuk memperoleh pendapatan yang pastinya dalam kelompok harus membagi tugas masing-masing dengan adil. Tujuannya supaya kelompok yang sudah dibuat dapat berkembang sesuai dengan harapan”* (Rahmawati, Selaku Ketua Kelompok, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, 2021).

Proses pertukaran informasi antara ketua pengelolaan dengan anggota dalam mengentaskan kemiskinan seringkali terjadi perselisihan antara sesama anggota. Perselisihan yang terjadi dikarenakan perbedaan argument sehingga menyebabkan pekerjaan lama dan kurang optimal. Adapun hasil wawancara dengan Ibu

Rahmawati selaku ketua kelompok KUBE Melati di Kecamatan Bandar Baru dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Pertukaran informasi antara sesama anggota sampai saat ini masih terdapat beberapa perselisihan. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat atau argument satu sama lain. Penyebab dari ketidakkompakan kelompok menyebabkan sedikit pengunjung dan pekerjaan yang dilakukan kurang optimal”* (Rahmawati, Selaku Ketua Kelompok, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, 2021).

Wawancara ketiga dengan Ibu Mahyuni selaku anggota dari program KUBE Kecamatan Bandar Baru dengan jenis usaha membuat kue. Perubahan yang terjadi setelah menjadi anggota dari kelompok KUBE adalah mampu membuka peluang kerja yang dapat menghasilkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Informasi yang diperoleh dari ketua pengelola dalam pelaksanaan program KUBE untuk selalu bekerja dengan penuh semangat serta memberikan bimbingan sampai memiliki kemahiran. Adapun hasil wawancara dengan Mahyuni selaku anggota dalam kelompok KUBE Melati, maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Program KUBE yang dibentuk di Kecamatan Bandar Baru program KUBE yang dibentuk berupa pembuatan kue. Manfaat penerima KUBE ini mampu mengembangkan usahanya. Hal ini dengan mempelajari program yang dipilih sehingga memberikan bimbingan serta memiliki kemahiran”* (Mahyuni, Selaku Ketua Kelompok, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, 2021).

Hasil wawancara keempat dengan Siti Hawa selaku ketua kelompok dari program KUBE Kecamatan Panteraja mengatakan bahwa usaha yang dibina selama ini tentang usaha menjahit.



Sebagai ketua pengelola pelaksanaan atau pengelolaan KUBE ini sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk dijalankan secara rutin. Pembentukan usaha menjahit bekerja setiap hari dan mampu bekerjasama, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam bekerja. Adapun hasil wawancara dengan Siti Hawa KUBE Seulanga dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Usaha yang dikembangkan selama ini tentang usaha menjahit. Pengelola maupun pelaksanaan KUBE ini sudah dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai menjahit ini dilakukan setiap hari. Meskipun pekerjaan menjahit ini dilakukan secara berkelompok, akan tetapi kegiatan ini dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat dengan mudah dilakukannya”* (Siti Hawa Selaku Ketua Kelompok, Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya, 2021).

Peran kelompok (KUBE) dalam dapat meningkatkan pendapatan kelompok, sehingga memberikan penghasilan bagi pihak pengelola dan pekerjanya. Antara ketua kelompok dengan para anggota juga saling mengingatkan satu sama lainnya jika mengalami kesalahpahaman tertentu. Adapun hasil wawancara dengan Siti Hawa KUBE Melati dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Melalui program kelompok (KUBE) ini dapat meningkatkan pendapatan pengelola atau ketua program tersebut dan para anggotanya. Pekerjaan menjahit ini dilaksanakan setiap hari yang dilakukan secara berkelompok dan sesama anggotanya juga dapat bekerjasama dengan baik”* (Siti Hawa, Selaku Ketua Kelompok, Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya, 2021).



Hasil wawancara kelima dengan Ibu Fitriani selaku anggota kelompok (KUBE) dengan jenis usaha menjahit di Kecamatan Panteraja mengatakan bahwa melalui program kelompok (KUBE) ini mampu memberikan perubahan. Salah satu perubahan dengan adanya kelompok ini dapat memberikan peluang kerja bagi sebagian masyarakat yang membutuhkannya. Manfaat mengikuti program KUBE ini dapat membantu perekonomian masyarakat, karena modal usaha yang diberikan tersebut sangat membantu pekerjaan masyarakat itu sendiri. Dalam pembentukan kelompok KUBE, sebagai pengelola atau ketua kelompok juga dapat bekerja dengan baik, sehingga segala informasi yang disampaikan sangat mudah diterima oleh anggota kelompoknya. Adapun hasil wawancara dengan Fitriani KUBE Seulanga dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Perubahan yang terjadi setelah menjadi bagian dari kelompok (KUBE) dapat dilihat dari peluang kerja yang sebelumnya memang belum pernah diterimanya. Hal ini dikarenakan dapat membantu modal usaha. Salah satu perubahan dapat dilihat dari banyaknya peluang kerja serta membantu perekonomian masyarakat. Bahkan informasi yang disampaikan ketua kelompok dapat diterima oleh anggota kelompoknya masing-masing” (Fitriani, Selaku Anggota Kelompok, Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara keenam dengan Ibu Barossanah selaku ketua kelompok di Kecamatan Trienggadeng dengan nama KUBE Seulanga mengatakan bahwa pelaksanaan atau pengelolaan kelompok KUBE mampu dilaksanakan sesuai dengan pengarahannya.

ketua kelompok. Peran kelompok (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan pengelola atau anggota sangat baik, karena dapat membantu perekonomian masyarakat itu sendiri. Kerjasama yang dibina oleh setiap kelompok KUBE ini mampu mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang susah dalam perekonomiannya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Barossanah KUBE Seulanga dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan atau pengelolaan kelompok KUBE ini sudah mampu dijalankan sesuai dengan pengarahannya ketua kelompok masing-masing. Peran kelompok KUBE mampu meningkatkan pendapatan bagi setiap kelompok atau anggota, karena dapat membantu perekonomian dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan antara ketua kelompok dengan anggota kelompok dapat bekerjasama, sehingga mampu mengentaskan kemiskinan secara bersama-sama” (Fitriani, Selaku Ketua Kelompok, Kec. Tringgadeng, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara ketujuh dengan Ibu Fatimah selaku anggota kelompok KUBE Seulanga di Kecamatan Tringgadeng mengatakan bahwa setelah menjadi bagian dari kelompok KUBE ini sudah terdapat beberapa perubahan. Salah satu perubahannya adalah mampu merubah perekonomian keluarga, karena dapat mengembangkan usaha secara berkelompok. Manfaat dengan adanya kelompok KUBE ini dapat membantu biaya kehidupan sehari-hari. Ketua kelompok dan anggotanya juga mampu bekerjasama dengan saling menjaga kekompakan serta bertanggung jawab dengan pekerjaan masing-masing. Adapun hasil wawancara

dengan Ibu Fatimah KUBE Seulanga dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Banyak perubahan yang terjadi setelah saya termasuk dalam bagian kelompok KUBE. Salah satu perubahannya dapat membantu perekonomian serta biaya kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Hal ini juga berpengaruh terhadap kerjasama yang baik antara ketua dan anggotanya. Kerjasama ini dapat tercipta karena antara ketua dan anggota saling kompak dan bertanggungjawab terhadap pekerjaannya masing-masing” (Fatimah, Selaku Anggota Kelompok, Kec. Tringgadeng, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara kedelapan dengan Ibu Nurul Hayati selaku ketua kelompok KUBE Usaha Rakan di Kecamatan Meuredu mengatakan bahwa pelaksanaan program KUBE ini sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan program KUBE ini sangat membantu kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan penghasilan sebelumnya sehingga memperoleh penghasilan. Kelompok KUBE khususnya dalam jenis usaha membuat kue ini mampu meningkatkan pendapatan, sehingga setiap hari memperoleh keuntungan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya. Ketua kelompok juga mampu bekerjasama dengan para anggotanya, sehingga berimbas pada pekerjaan kelompok yang kompak dan mampu bekerja sama dengan baik tanpa mementingkan ego dalam satu pihak saja. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hayati KUBE Usaha Rakan dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Melalui program KUBE ini mampu membantu kalangan masyarakat yang membuhkan, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Usaha membuat kue yang dibuat sebagai pekerjaan pada kelompok KUBE usaha rakan ini mampu memperoleh pendapatan, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Bahkan antara ketua kelompok dan anggota kelompok juga saling berkerjasama, sehingga tidak mementingkan hanya satu pihak ego saja” (Nurul Hayati Selaku Ketua Kelompok, Kec. Meuredu, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara kesembilan dengan Ibu Ratna Dewi selaku anggota kelompok KUBE Usaha Rakan di Kecamatan Meuredu mengatakan bahwa terbentuknya suatu program KUBE mampu memberikan perubahan bagi masyarakat miskin yang sangat membutuhkan. Perubahan dapat dilihat dari adanya peluang kerja yang mampu membantu perekonomian keluarganya. Manfaat sebagai bagian dari kelompok KUBE dapat membantu kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tersebut. Adapun hasil wawancaranya dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Terbentuknya program KUBE ini mampu memberikan perubahan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini dikarenakan melalui program KUBE masyarakat memiliki peluang kerja, sehingga mampu membantu perekonomian keluarganya. Manfaatnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat tersebut” (Ratna Dewi Selaku Anggota Kelompok, Kec. Meuredu, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara kesepuluh dengan Ibu Erlinawati selaku ketua kelompok KUBE Berkat Usaha di Kecamatan Meurah Dua mengatakan bahwa pelaksanaan atau pengelolaan kelompok KUBE sudah berjalan dengan baik. Peran kelompok KUBE ini mampu

meningkatkan pendapatan bagi pengelolaan atau anggotanya. Hal ini dikarenakan usaha jualan kios ini memiliki kemajuan, karena kerjasama antara ketua kelompok dengan anggotanya saling kompak. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Erlinawati KUBE Berkat Usaha dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan atau pengelolaan kelompok KUBE sudah berjalan dengan baik, karena pengelolaan atau pelaksanaan dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, program ini dapat berjalan dengan lancar, karena antara ketua kelompok dengan anggota-anggotanya saling bekerjasama satu sama lainnya”*(Erlinawati Selaku Ketua Kelompok, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, 2021).

Hasil wawancara kesebelas dengan Ibu Marlina selaku anggota kelompok KUBE Berkat Usaha di Kecamatan Meurah Dua mengatakan bahwa pelaksanaan atau pengelolaan kelompok KUBE sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Usaha yang dibentuk melalui program KUBE ini memiliki banyak manfaat seperti mampu mengentaskan kemiskinan di sebagian kalangan masyarakat Murah Dua. Informasi yang disampaikan oleh ketua kelompok juga mampu diterima dengan baik oleh anggota-anggota kelompoknya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa kekompakan antar anggota kelompok mampu menciptakan sebuah usaha yang berkembang, sehingga tidak ada perselisihan antara satu sama lainnya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Marlina KUBE Berkat Usaha dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan atau pengelolaan kelompok KUBE sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Melalui program KUBE ini memiliki banyak manfaat karena dapat*

*mengentaskan kemiskinan pada sebagian masyarakat Meurah Dua yang mengalami tingkat kesulitan ekonomi. Bahkan informasi yang disampaikan oleh ketua dapat diterima dengan baik oleh anggota kelompok tersebut” (Marlina Selaku Anggota Kelompok, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara keduabelas dengan Bapak Said Ilham sebagai ketua kelompok KUBE 59 bengkel las bersaudara di Kecamatan Ulim mengatakan bahwa pelaksanaan atau pengelolaan usaha bersama ini tentang usaha bengkel las. Program KUBE ini mampu memberikan bantuan dana untuk mengembangkan usaha tersebut. Manfaat pengadaan program KUBE mampu memberikan peluang kerja pada masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah tertentu. Terbentuknya program KUBE ini dalam satu kelompok terdiri dari 10 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Dalam satu kelompok ini mampu bertukar pendapat satu sama lainnya sehingga mampu membangun sebuah usaha untuk mengentaskan kemiskinan atau kekurangan ekonomi yang dialami selama ini. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Said Ilham KUBE Bengkel Las Bersaudara dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan atau pengelolaan usaha bersama yang dibentuk dari program KUBE ini tentang bengkel las. Manfaat terbentuknya program KUBE ini bertujuan untuk memberikan bantuan dana modal usaha, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan atau masyarakat yang kekurangan dalam kebutuhan ekonominya. Dalam satu kelompok terbentuk 10 orang*



*terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota”(Said Ilham, Ketua Kelompok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara ketigabelas dengan Bapak Muzakir Usman selaku anggota dari kelompok KUBE 59 Bengkel Las Bersaudara mengatakan bahwa setelah adanya program KUBE ini sangat membantu masyarakat desa Ulim, karena dapat menciptakan sebuah lapangan kerja. Program KUBE membawa perubahan bagi masyarakat karena dapat memberikan modal usaha yang mampu mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Manfaat pembentukan usaha untuk memudahkan bagi masyarakat memperoleh penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya. Pengarahan program KUBE ini mampu dibimbing dengan baik oleh ketua pengelola dalam pelaksanaan kelompok KUBE. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muzakir Usman KUBE Bengkel Las Bersaudara dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Setelah adanya program ini banyak perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut. Manfaat dengan adanya program KUBE mampu memberikan perubahan kepada masyarakat karena untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan modal usaha. Manfaat pembentukan usaha untuk memudahkan masyarakat memperoleh penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya. Pengarahan program KUBE sudah dibimbing dengan baik bagi pengelola dalam kelompok KUBE tersebut”(Muzakir Usman, Anggota Kelompok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara keempatbelas dengan Ibu Rasyidah selaku ketua kelompok KUBE Bungong Jumpa di Kecamatan Jangka



Buya mengatakan bahwa pelaksanaan atau pengelolaan yang dibentuk dalam kelompok ini dapat berjalan dengan baik dengan usaha menjahit. Peran kelompok (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan kelompok pengelola dan anggota dengan selalu menjaga kekompakan tim, sehingga kinerja dapat dilakukan dengan tepat waktu. Kekompakan dalam sebuah tim kerja perlu ditingkatkan, karena untuk mengembangkan usaha yang telah dibentuknya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rasyidah KUBE Bungong dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan atau pengelolaan yang telah dibentuk oleh kelompok KUBE Bungong Jumpa di Kecamatan Jangka Buya sudah berjalan dengan baik pada bidang usaha menjahit. Salah satu peran kelompok KUBE dalam meningkatkan pendapatan dengan dengan selalu menjaga kekompakan tim, sehingga pekerjaannya dapat terlaksana dengan tepat waktu” (Rasyidah, Ketua Kelompok, Kec. Jangka Buya, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara kelimabelas dengan Ibu Nur Aini selaku anggota kelompok KUBE bungong Jumpa di Kecamatan Jangka Baya mengatakan bahwa melalui program KUBE ini mampu memberikan perubahan pada kalangan masyarakat pada umumnya. Tujuan pembentukan program KUBE untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga masyarakat mudah dalam menenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam segala pelaksanaan kegiatan sebagai ketua kelompok mampu memberikan pengarahan-pengarahan bagi anggota, sehingga usaha yang dibentuk secara bersama berjalan dengan lancar. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Nur Afni KUBE Bungong Jumpa dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Program KUBE ini mampu memberikan perubahan bagi masyarakat untuk membangun sebuah usaha bersama, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan program KUBE ini dibentuk melalui beberapa anggota sesuai dengan bidang usahanya. Ketua kelompok juga mampu memberikan pengarahan bagi anggota, sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar” (Nur Aini, Anggota Kelompok, Kec. Jangka Buya, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara keenambelas dengan Ibu Aman Farisyah selaku ketua kelompok KUBE Ubena di Kecamatan Bandar Dua mengatakan bahwa pelaksanaan atau pengelolaan kelompok KUBE dapat dijalankan sesuai dengan harapan. Peran kelompok KUBE dalam meningkatkan pendapatan kelompok dengan melakukan kerjasama secara kompak, sehingga membentuk suatu usaha yang baik. Antara sesama tim selalu kompak agar dapat mengentaskan kemiskinan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Aman Farisyah KUBE Ubena dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan atau pengelolaan kelompok KUBE sudah mampu dijalankan sesuai dengan harapan. Sebagaimana diketahui bahwa peran kelompok KUBE dapat membentuk suatu usaha, sehingga antara sesama tim diperlukan kekompakan agar dapat mengentaskan kemiskinan” (Aman Farisyah, Ketua Kelompok, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara ketujuhbelas dengan Ibu Marliza selaku anggota kelompok KUBE Ubena di Kecamatan Bandar Dua mengatakan bahwa setelah menjadi bagian dari kelompok KUBE

ini mampu memberikan perubahan dalam sistem perekonomian. Manfaat dengan adanya program KUBE mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan masyarakat penerima bantuan modal usaha sudah memiliki peluang kerja. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Marliza KUBE Ukena dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Setelah menjadi bagian kelompok KUBE mampu memberikan perubahan dalam sistem perekonomian. Hal ini dikarenakan manfaat adanya program KUBE ini mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui modal usaha bersama ini mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga” (Marliza, Anggota Kelompok, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial, ketua, dan anggota dari program KUBE, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut pertama kali pihak dinas sosial melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian melakukan seleksi pada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dana. Kreteria masyarakat yang ditetapkan Dinas Sosial adalah masyarakat miskin, namun yang mempunyai usaha yang terbentuk atas (5-10) anggota yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota kelompok lainnya. Bantuan modal usaha yang diberikan dalam bentuk barang bukan uang tunai. Proses pembinaan serta pengawasan bagi anggota penerima KUBE ini dilakukan secara rutin dalam seminggu dua kali. Hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan usaha yang dibina oleh masing-

masing kelompok penerima KUBE tersebut. Program KUBE mampu mengentaskan kemiskinan, apalagi pada masa Covid-19 setiap orang susah mencari pekerjaan, sehingga dengan program ini masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

#### **4.3.2 Kebijakan Pemerintah Melalui Dinas Sosial dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya**

Kebijakan pemerintah dinas sosial dalam mengoptimalkan proses pelaksanaan program KUBE di Kabupaten Pidie Jaya dengan mengusulkan agar program ini dapat dijalankan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sebagai pihak yang memiliki wewenang secara penuh terhadap penentuan penerima bantuan dana program KUBE, maka dinas sosial melakukan proses sosialisasi terlebih dahulu. Untuk mengetahui jika pelaksanaan program KUBE belum optimal, bagaimana kebijakan dari pihak dinas sosial dalam mengoptimalkannya, agar sasaran kelompok tersebut dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Agus Fauzi, S.Kep, M.K.M selaku Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya, sebagai berikut:

*“Dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya mengusulkan agar program ini dapat dijalankan sebagaimana yang telah dilakukan tahun-tahun lalu, untuk perkembangan ke depan, namun saat sekarang belum ditindaklanjuti di provinsi. Kami juga melakukan perbaikan dalam rancangan program kerja jangka menengah Dinas Sosial dalam APBK agar program KUBE dapat dijalankan sehingga dapat kami optimalkan” (Agus Fauzi, S.Kep, M.K.M, Dinas Sosial, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Apa yang setelahnya dilakukan Dinas Sosial untuk dapat mengentaskan kemiskinan di kabupaten Pidie Jaya.

*“Dalam hal mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya, pihak Dinas Sosial sudah membuat suatu dan sudah berjalan satu tahun ini yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP), program ini dilakukan atas perorang, persyaratan dan prosedurnya sama seperti KUBE, namun atas satu orang saja dan produk pengembangannya beragaram juga” (Agus Fauzi, S.Kep, M.K.M, Dinas Sosial, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Wawancara dengan beberapa kelompok program KUBE ini tentang kebijakan dinas sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, maka terdiri dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diantaranya;

1. Apakah ketua pengelola dan anggota mendapatkan pelatihan/pembinaan tentang program kelompok (KUBE) dari Dinas Sosial, bapak/ibu?
2. Apakah ada kerjasama antara ketua pengelola dengan ketua pengelola kelompok (KUBE) lainnya yang di Kabupaten Pidie Jaya, bapak/ibu?
3. Apakah ketua pengelola dan anggota melakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan dari kepala desa/masyarakat dalam penguatan kelompok, serta merekrut anggota lainnya, bapak/ibu?.

Berdasarkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada ketua kelompok program KUBE tersebut, maka wawancara

pertama yang dilakukan dengan Ibu Rahmawati selaku ketua kelompok dengan jenis usaha membuat kue dari Kecamatan Bandar Baru mengatakan bahwa sebelum menerima bantuan pendanaan berupa barang (alat produksi) maka terlebih dahulu mendapatkan pembinaan dan pengarahan. Kegiatan pembinaan atau pengarahan ini hanya diarahkan sebagian saja oleh pihak dinas sosial, tetapi selebihnya diserahkan kepala masing-masing kelompok untuk melaksanakannya sesuai dengan harapannya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati KUBE Melati dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Untuk hal itu, tentu mendapatkan arahan sebelum menerima bantuan (alat produksi), dan juga mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial. Namun, hal tersebut hanya berjalan dan dilakukan oleh Dinas Sosial sementara, selebihnya diserahkan pada kepada kelompok bagaimana menentukan produksinya”*(Rahmawati, Ketua Kelompok, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, 2021).

Program KUBE ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara berkelompok atau bersama. Namun, kadangkala kerjasama ini sedikit susah dilaksanakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang disebabkan oleh jarak atau perbedaan Kecamatan. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku ketua kelompok usaha membuat kue di Kecamatan Bandar Baru sebagai berikut:

*“Berhubungan ini, tidak ada kerjasama antar ketua kelompok dengan ketua kelompok lain, mungkin dikarenakan perbedaan kecamatan dan jenis kelompok yang dikelola serta kekurangan informasi tentang kelompok*



*lain” (Rahmawati, Ketua Kelompok, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Program KUBE ini memiliki kemajuan pesat pada tahun 2019, namun dikarenakan pandemic Covid-19, maka program KUBE diberhentikan untuk sementara waktu. Akan tetapi dalam pada tahun 2019 sebelumnya program ini selalu diberikan penguatan kelompok. Dalam hal ini ketua pengelola memberitahukan kepada kepala desa untuk memberikan bantuan KUBE ini sesuai dengan harapan. Masyarakat penerima bantuan ini harus yang memiliki bakat dan minat usaha, sehingga segala usaha yang dirintisnya berkembang. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati KUBE Melati selaku ketua kelompok Kecamatan Bandar Baru dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Dalam hal sosialisasi untuk penguatan kelompok, dari pihak ketua memberitahukan kepada Kepala Desa, selain mendapatkan bantuan dari desa untuk menjalankan kegiatan juga mendapatkan anggota yang minat lebih dalam berusaha, namun sayang hal tersebut terhenti disebabkan oleh pandemi pada saat sekarang” (Rahmawati, Ketua Kelompok, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara kedua dengan Ibu Siti Hawa selaku ketua kelompok Kecamatan Panteraja jenis usaha menjahit mengatakan bahwa sebelum bantuan program KUBE ini diberikan kepada masing-masing kelompok, maka diberikan pengarahan dan pembinaan terlebih dahulu. Tujuan melakukan pembinaan untuk memberitahukan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak



penerima bantuan tersebut agar usahanya sesuai dengan harapan. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Hawa KUBE Seulanga dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Sebenarnya tujuan pelaksanaan pembinaan dan pengarahan ini agar ketua kelompok beserta anggotanya tahu tentang bagaimana agar usahanya dapat berkembang sesuai dengan harapan” (Siti Hawa Ketua Kelompok, Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Kerjasama antara sesama kelompok lainnya susah diterapkan karena disebabkan oleh jarak tempuh yang tidak memungkinkan. Kerjasama ini hanya bisa dijalankan antara sesama anggota kelompok saja. Pihak dinas sosial juga memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat penerima bantuan untuk memberikan penguatan dan motivasi dalam menjalankan usaha kedepannya. Adapun hasil wawancara dengan ibu Siti Hawa KUBE Seulanga sebagai berikut:

*“Kerjasama antara sesama kelompok lainnya susah karena beda kecamatan, tetapi kalau antara sesama kelompok sudah mampu diterapkan dengan baik. Kebijakan dinas pendidikan juga dapat dilihat dari proses sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat penerima bantuan tersebut” (Siti Hawa Ketua Kelompok, Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara ketiga dengan Ibu Barossanah selaku ketua kelompok KUBE di Kecamatan Tringgadeng jenis usaha anyaman tikar mengatakan bahwa pihak dinas dan ketua pengelolaan sebelum memberikan bantuan memang melakukan pembinaan, pengarahan serta sosialisasi. Tujuannya untuk memberikan bimbingan terhadap usaha yang dibina oleh setiap

kelompok agar dapat berjalan sesuai harapan. Pihak pengelola bantuan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepala desa agar dapat memantau kegiatan usaha bagi penerima bantuan (alat produksi) usaha yang dikembangkan oleh setiap kelompok tersebut. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Barossamah KUBE Seulanga dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Jenis usaha yang kami lakukan melalui bantuan program KUBE ini adalah anyaman tikar yang sudah kami lakukan sejak tahun 2019. Meskipun sekarang ini sejak tahun 2020 pendanaan ini sudah tidak dilakukan lagi, maka kami tetap masih menggeluti usaha tersebut. Sebelum diberikan bantuan, kami diberikan pengarahan, pembinaan, dan sosialisasi secara langsung oleh pihak dinas dan pengelola lainnya” (Barossamah Ketua Kelompok, Kec. Tringadeng, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara keempat dengan Ibu Nurul Hayati selaku ketua kelompok program KUBE di Kecamatan Meuredu jenis usaha membuat kue mengatakan bahwa pada saat sebelum memberikan bantuan (alat produksi), maka pihak ketua pengelola melakukan kegiatan pembinaan. Harapannya agar pihak penerima bantuan selalu memberikan informasi tentang perkembangan usahanya setiap dua minggu sekali ketika melakukan survei ke lapangan. Kerjasama yang dilakukan selama ini hanya sebatas sesama anggota kelompok saja. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hayati KUBE Usaha Rakan dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Sebelum diberikan bantuan kami memang terlebih dahulu diberikan bimbingan secara langsung oleh ketua pengelola. Harapan memberikan bimbingan dengan membina agar penerima bantuan menjalankan tugas sebagai KUBE*

*dengan jujur, sehingga dapat melaporakan ke piha dinas atau ketua pengelola lainnya tentang laporan perkembangan usaha selama dua minggu sekali” (Nurul Hayati, Ketua Kelompok, Kec. Meuredu, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara kelima dengan Ibu Erlinawati selaku ketua kelompok program KUBE Kecamatan Meurah Dua dengan jenis usaha Jualan kios mengatakan bahwa pembinaan atau pengarahan pihak dinas maupun ketua pengelola sangat penting karena dapat membantu memperingati sesama anggota harus kompak dalam bekerja serta melakukan usaha sesuai dengan harapan. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Erlinawati KUBE Berkat Usaha dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Pembinaan yang dilakukan oleh pihak dinas maupun ketua pengelolaan program KUBE ini sangat peting diterapkan, mengingat sebagai peringatan atau pengarahan agar usaha dapat dijalankan sesuai dengan harapan” (Erlinawati, Ketua Kelompok, Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara keenam dengan Bapak Said Ilham selaku ketua kelompok KUBE Kecamatan Ulim jenis usaha bengkel las mengatakan bahwa sebelum memberikan bantuan, maka pihak dinas melakukan pembinaan secara langsung. Salah satu pembinaan yang diberikan oleh pihak dinas atau ketua pengelola lainnya agar setiap anggota kelompok harus memiliki kekompakan sehingga usah dapat berjalan dengan lancar. Meskipun bantuan yang diberikan tidak mencakup semuanya, tetapi sudah sangat

membantu. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Said Ilham KUBE Bengkel Las Bersaudara sebagai berikut:

*“Pembinaan memang dilakukan oleh pihak dinas atau ketua pengelola program KUBE tersebut. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak dinas tentang pengarahan agar sesama kelompok harus kompak dengan tujuan agar usaha dapat dijalankan dengan lancar dan sesuai harapan” (Said Ilham Ketua Kelompok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara ketujuh dengan Ibu Rasyidah selaku ketua kelompok KUBE Kecamatan Jangka Buaya jenis usaha menjahit mengatakan bahwa sebelum menjalankan usaha bersama, maka dilakukan terlebih dahulu pembinaan, pengarahan serta sosialisasi. Pembinaan dan pengarahan diberikan sebagai langkah awal yang diinformasikan oleh pihak dinas atau pengelola program agar setiap penerima bantuan KUBE dapat mempergunakan alat produksi yang diberikan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Selanjutnya sosialisasi dilakukan setelah setiap kelompok menjalankannya tetapi adakala dua minggu sekali melakukan sosialisasi untuk melihat perkembangan usahanya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rasyidah KUBE Bungong dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Sebelum menjalankan usaha, maka pihak dinas sosial atau ketua pengelola melakukan pembinaan dan pengarahan terlebih dahulu kepada penerima bantuan. Arahan yang diberikan tentang harus mempergunakan alat produksi yang telah diberikan sesuai dengan harapan. Kemudian pihak dinas juga mengatakan bahwa akan melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan usahanya” (Rasyidah Ketua Kelompok, Kec. Jangka Buaya, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Hasil wawancara kedelapan dengan Ibu Aman Farisyah selaku ketua kelompok Kecamatan Bandar Dua jenis usaha membuat kue mengatakan bahwa pembinaan dan pengarahan memang sangat diperlukan. Selain itu, kekompakan tim kerja juga sanga diutamakan, sehingga apabila ada pihak dinas melakukan sosialisasi kegiatan usahanya sesuai dengan harapan. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Aman Farisyah KUBE Ubena dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya pembinaan dan pengarahan sangat diperukan karena untuk memberikan pengarahan tentang penggunaan bantuan yang semestinya. Bahkan melalui pembinaan dan pengarahan ini juga mampu mengarahkan para anggota tim program KUBE dapat menjalankan usaha dengan kompak. Hal ini dikarenakan kekompakan sangat membantu usaha seseorang tersebut” (*Aman Farisyah Ketua Kelompok, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya, 2021*).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dari pihak dinas dalam mengoptimalkan pelaksanaan program KUBE dengan mengusulkan beberapa program seperti tahun-tahun sebelumnya. Tujuan pembentuka program KUBE ini untuk mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah. Sebelum memberikan bantuan (alat produksi) sesuai dengan jenis usahanya masing-masing, maka pihak dinas melakukan pembinaan, pengarahan, serta sosialiasi langsung pada pihak penerima. Hal ini karena dapat menginformasikan tentang penggunaan bantuan tersebut sesuai dengan usaha yang dikembangkannya.

### **4.3.3 Kendala dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya**

Pelaksanaan program KUBE pastinya ada beberapa kendala yang dihadapinya baik dari pihak dinas maupun anggota kelompok penerima bantuan KUBE tersebut. Kendala-kendala dalam pelaksanaan program KUBE ini memnag seringkali terjadi perselisihan satu sama lainnya, tetapu harus saling menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak dinas sosial diantaranya; apa saja kendala dari pihak dinas sosial dalam pelaksanaan program KUBE?.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Fauzi, S.Kep, M.K.M Selaku Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya mengatakan bahwa tidak produktifnya sebagian masyarakat untuk mengikuti kegiatan arahan evaluasi. Kendala yang dihadapi oleh pihak dinas sekarang ini memnag sudah tidak ada lagi pemberian bantuan KUBE sejak Covid sampai sekarang. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Agus Fauzi Selaku Dinas Sosial sebagai berikut:

*“Kendala yang dihadapi dinas sosial yaitu anggota-anggota setiap kelompok, misalnya dalam arahan evaluasi untuk lebih produktif dalam kebersamaan (baik diterima oleh ketua tapi enggan di anggota), hal itu mungkin sudah lazim terjadi. Namun, kendala yang serius kami hadapi adalah tahun 2021 ini tidak ada lagi pemberian bantuan melalui Kelompok Usaha Bersama, karena ada perubahan pada APBA sehingga di Kabupaten macet dalam pelaksanaan program KUBE dalam mengentaskan*



*kemiskinan” (Agus Fauzi, S.Kep, M.K.M, Dinas Sosial, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Selanjutnya pertanyaan untuk ketua kelompok diantaranya; apa saja kendala ketua pengelola dan anggota dalam pelaksanaan program (KUBE)?. Hasil wawancara dengan beberapa ketua kelompok juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa masyarakat ketika melakukan kegiatan sosialiasi dengan mengundang semua kelompok untuk hadir, maka msih ada beberapa masyarakat yang sulit untuk hadir. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian masyarakat menggagap apabila sudah ada yang mewakili setiap anggota kelompoknya sudah terpenuhi. Padahal tujuan terbentuknya kegiatan evaluasi untuk membina dan mengarahkan penerima bantuan untuk melaksanakan usahannya sesuai dengan harapan dan sesuai denga bantuan yang diterimanya. Salah satu wawancara dengan ketua kelompok KUBE Seulanga Kecamatan Tringadeng dapat dinyatakan sebagai berikut:

*“Kendala yang dihadapi adalah saat berkumpul dengan anggota dalam memberikan pendapat untuk evaluasi antara sesama anggota, pada saat pelaksanaan kegiatan kadang tidak semua anggota hadir dan juga tidak sejalan dengan program ini. Misalnya, anggota meminta kegiatan ini dilakukan di rumah masing-masing tanpa sebuah tempat yang pasti untuk dilakukan bersama-sama”(Barossamah Ketua Kelompok, Kec. Tringadeng, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Pertanyaan selanjutnya yang ditukukan kepada anggota kelompok diantaranya; Apa saja hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota kelompok (KUBE). Kemudian sebagai



anggota kelompok (KUBE), upaya apa saja yang itu dilakukan untuk keberlangsungan kelompok kedepan, serta bisa mengentaskan kemiskinan?. Beberapa hasil wawancara dengan anggota program KUBE mengatakan bahwa hambatan atau kendala dalam kerja satu kelompok atau tim mengenai perselisihan pendapat satu sama lainnya. Hal itu seringkali terjadi, karena pekerjaan tim merupakan salah satu kerja secara bersama. Oleh karena itu seharusnya diperlukan kekompakan antara satu sama lainnya. Adapun hasil wawancara dengan salah satu anggota diantaranya;

*“Hambatan sebagai anggota mungkin lebih pada perbedaan pendapat antar sesama, dalam hal itu susah disatukan pendapat antara anggota kelompok. Perbedaan pendapat ini menjadi salah satu alasan kenapa kerja tim harus kompak dan saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing” (Nur Aini Anggota Kelompok, Kec. Jangka Buaya, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Upaya yang dilakukan kedepannya agar usaha yang telah dibentuk melalui program KUBE dapat mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang membutuhkan tersebut, maka harus giat dalam belajar serta menegndalikan usaha sesuai dengan harapan. Adapun hasil wawancara dengan salah satu anggota sebagai berikut:

*“Dalam hal itu, melakukan lebih giat dalam belajar menjahit sesuai dengan bantuan yang dianjurkan. Masalah kedepan bisa mengentaskan kemiskinan, kegiatan yang sudah berjalan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan*

*dapat meningkatkan pendapatan ” (Fitriani, Anggota Kelompok, Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya, 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas sosial, ketua kelompok, dan anggota kelompok dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam membina sebuah usaha bersama. Kendala yang dialami oleh pihak dinas sosial dalam pelaksanaan program KUBE diantaranya masih terdapat sebagian masyarakat atau anggota penerima bantuan (bahan produksi) dalam kegiatan evaluasi masih kurang produktif untuk hadir. Hanya perwakilan dari setiap kelompok yang mengikuti kegiatan tersebut. Kendala yang dialami oleh pihak dinas sejak tahun 2020 masa pandemik sampai sekarang tidak ada lagi pemberian bantuan KUBE, sehingga sangat sulit bagi pihak dinas sosial untuk membandingkan seberapa berpengaruhnya bantuan KUBE dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya

#### **4.4 Pembahasan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat dirincikan bahwa pelaksanaan program KUBE pertama kali pihak dinas sosial melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian melakukan seleksi pada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dana. Kriteria masyarakat yang ditetapkan Dinas Sosial adalah masyarakat miskin, namun yang mempunyai usaha yang terbentuk atas (5-10) anggota yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota kelompok

lainnya. Bantuan modal usaha yang diberikan dalam bentuk barang bukan uang tunai. Proses pembinaan serta pengawasan bagi anggota penerima KUBE ini dilakukan secara rutin dalam seminggu dua kali. Tujuan kegiatan sosialisasi untuk melihat perkembangan usaha yang dibina oleh masing-masing kelompok penerima KUBE tersebut. Program KUBE mampu mengentaskan kemiskinan, apalagi pada masa Covid-19 setiap orang susah mencari pekerjaan, sehingga dengan program ini masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

Program KUBE ini hanya bertahan sampai tahun 2019, sehingga sejak pandemi covid-19 awal tahun 2020 sampai sekarang program KUBE ini belum dilanjutkan. Akan tetapi wawancara dengan beberapa anggota penerima bantuan KUBE tahun 2019 mengatakan bahwa bantuan ini sangat membantu masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan adanya modal kerja berupa perlengkapan kerja, maka masyarakat dapat menciptakan usaha secara berkelompok. Hal ini dapat membantu perekonomian keluarga untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wildanu et al (2021) mengatakan bahwa Kelompok Usaha Bersama memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan intelektual, dimana para anggota saling bertukar informasi dan ilmu, meningkatkan keterampilan dengan adanya pelatihan, saling menyemangati, mengembangkan kemampuan yang dimiliki, menyesuaikan kemampuan dengan yang dikerjakan, dan meningkatkan taraf kesejahteraan anggota

adalah meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, interaksi sosial terjalin dengan baik, meningkatkan kemampuan menghadapi masalah, meningkatkan pendapatan, adanya kerjasama dan perkembangan jenis usaha.

Tujuan pelaksanaan program KUBE untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Menurut Putro et al (2020) bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah wadah berkumpul masyarakat miskin yang memiliki kesamaan tujuan dalam membangun kesejahteraan lewat kelompok. Dengan pembentukan program tersebut kelompok masyarakat yang kurang mampu dapat berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pembangunan perekonomian sehingga masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya kebijakan pihak dinas dalam mengoptimalkan pelaksanaan program KUBE yaitu dengan mengusulkan beberapa program seperti tahun-tahun sebelumnya. Tujuan pembentukan program KUBE ini untuk mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah. Sebelum memberikan bantuan (alat produksi) sesuai dengan jenis usahanya masing-masing, maka pihak dinas melakukan pembinaan, pengarahan, serta melakukan kegiatan sosialisasi langsung pada pihak penerima. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nanlohy et al (2019) bahwa program KUBE yang berasal dari Kementerian Sosial dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab kepada Dinas Sosial pada setiap Kabupaten/Kota pada masing-masing provinsi di

Indonesia. Kebijakan yang dikemukakan oleh pihak dinas dalam mengoptimalkannya dengan melakukan pendampingan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh Nanholy (2019) bahwa pendamping KUBE sebagaimana ditemukan dilapangan melakukan perannya untuk menggerakkan dan memotivasi kelompok untuk ada dalam sebuah kegiatan menjalankan usaha mereka secara bersama-sama. Pemberian semangat ini terus pendamping lakukan selama pendamping berada bersama-sama dengan kelompok. Dengan harapan kelompok akan selalu memiliki semangat dan rasa kebersamaan dalam menjalankan usaha mereka.

Sebagaimana pelaksanaan program KUBE, maka juga terdapat beberapa kendala baik dari pihak dinas sosial, ketua kelompok maupun anggota kelompok itu sendiri. Kendala yang dihadapi dalam membentuk usaha KUBE masih terdapat sebagian masyarakat atau anggota penerima bantuan (bahan produksi) dalam kegiatan evaluasi masih kurang produktif untuk hadir. Hanya perwakilan dari setiap kelompok yang mengikuti kegiatan tersebut. Kendala yang dialami oleh pihak dinas sejak tahun 2020 masa pandemik sampai sekarang tidak ada lagi pemberian bantuan KUBE, sehingga sangat sulit bagi pihak dinas sosial untuk membandingkan seberapa berpengaruhnya bantuan KUBE dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu, kendala yang dialami oleh ketua kelompok atau anggota program KUBE dalam menjalankan usaha ini sangat terkendala dalam mengutarakan pendapat. Hal ini dikarenakan perselisihan pendapat

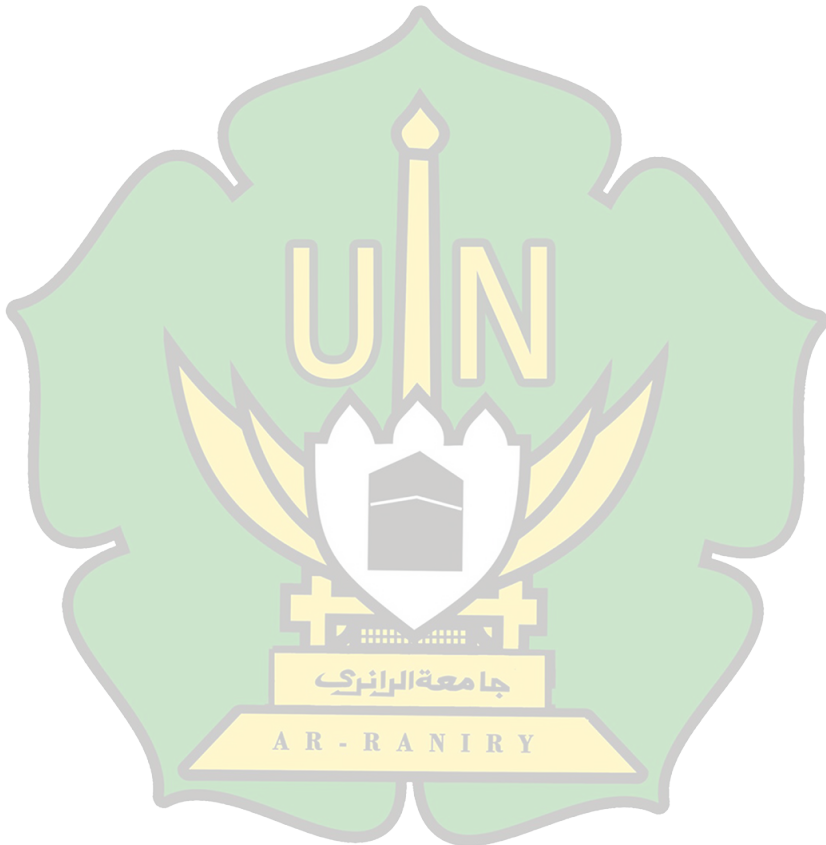
seringkali terjadi. Kendala yang dialami dalam Program KUBE ini masih terdapat beberapa usaha yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sitepu (2016) bahwa walaupun tidak dapat digeneralisasi secara nasional, akan tetapi hasil temuan beberapa pihak yang melakukan pengecekan KUBE di wilayah dan waktu berbeda seperti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Program Penanganan Fakir Miskin yang dilakukan melalui KUBE ternyata belum memperoleh kemajuan signifikan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan adanya program KUBE diantaranya:

- a. Masyarakat lebih produktif dalam meningkatkan pola kerjanya masing-masing, karena sudah ada kegiatan rutin setiap harinya.
- b. Melalui KUBE dapat mengatasi kesulitan perekonomian, karena usaha yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Dapat meningkatkan nilai sosial antara sesama, karena kerjanya secara berkelompok.

Selain itu, meskipun sejak pandemi tahun 2020 program KUBE sudah tidak ditangani kembali oleh pihak pemerintahan. Akan tetapi sebagian kelompok KUBE tahun 2019 lalu masih melanjutkan usahanya sampai sekarang. Jenis usaha yang masih berjalan sampai saat ini adalah usaha menjahit, pembuatan kue dan

bengkel las. ketiga jenis usaha tersebut masih dijadikan sebagai kegiatan rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Peran pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian melakukan seleksi pada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Kreteria masyarakat yang ditetapkan Dinas Sosial adalah masyarakat miskin yang beranggota 10 orang perkelompok. Proses pembinaan serta pengawasan bagi anggota penerima KUBE dilakukan secara rutin dalam seminggu dua kali.
2. Kebijakan pemerintah Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program KUBE di Kabupaten Pidie Jaya dengan mengusulkan beberapa program seperti tahun-tahun sebelumnya. Tujuan pembentukan program KUBE untuk mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah. Sebelum memberikan bantuan (alat produksi) sesuai dengan jenis usahanya masing-masing, maka pihak dinas melakukan

pembinaan, pengarahan, serta sosialisasi langsung pada pihak penerima.

3. Kendala dalam pelaksanaan program KUBE dalam pengentasan kemiskinan diantaranya; masih terdapat sebagian masyarakat atau anggota penerima bantuan dalam kegiatan evaluasi masih kurang produktif untuk hadir, perbedaan pendapat dalam kelompok, serta sejak tahun 2020 masa pandemik sampai sekarang tidak ada lagi pemberian bantuan KUBE, sehingga sangat sulit bagi pihak dinas sosial untuk membandingkan seberapa berpengaruhnya bantuan KUBE dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak dinas sosial dapat memantau secara menyeluruh agar program KUBE dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.
2. Kebijakan pihak dinas sosial dalam menetapkan para penerima bantuan KUBE ini dapat dilakukan pembinaan, pengarahan, serta sosialisasi langsung pada pihak penerima, agar program ini dapat berjalan sesuai harapan.
3. Penerima bantuan dapat mengikuti segala aspek sosialisasi yang diadakan oleh pihak dinas sosial, agar mengetahui tujuan KUBE dalam membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, Liyana. (2011). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010). *Skripsi Ekonomi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Azis, Samsul. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata (Study Kasus Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur). *Skripsi Ilmu Politik*. Universitas Muhammadiyah, Mataram.
- Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id> (diakses pada tanggal 15 Februari 2021).
- Bahagia. (2020). Peran Dinas Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. *Skripsi Ekonomi dan Bisnis*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Deliarnoy. (2010). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Diana, Elita. (2015). Peran Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Bambu (Bambussa Spp) di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Repository*, Mataram.
- Fahrozi, Muhammad. (2020) . Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube-Fm) Di Kecamatan

Sakra Kabupaten Lombok Timur. Mataram: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Firmansyah, Hairi. (2012). Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin. *Jurnal Agribisnis Pedesaan*, 2(2):172-176.

Haryari R. (2013). Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Jurnal Informasi*, 18(2):117-132.

<https://id.wikipedia.org/wiki/GempabumiPidieJaya2016> (diakses pada tanggal 20 November 2021).

<https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenPidieJaya> (diakses pada tanggal 20 November 2021).

Katmas, Ekarina. (2018). Analisis Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tayando TaM Perspektif Maqashid Syariah. *Tesis Ekonomi Syariah*, UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Limbong, Bernhard. (2011). *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Margaretha.

Nabila, Twin, Meilisa. (2020). Peran Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Program Keluarga Harapan Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo). Ponorogo: Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Nanlohy, Badhmore., Mulyana, Nandang., & Darwis, Saprudin Rudi. (2019). Dampak Peran Pendamping Terhadap Pengembangan Usaha Dari Kube (Kelompok Usaha Bersama) di Kota Ambon". *Jurnal Public Policy*, 5(2):83-97.

- Ningrum, Ayu, Diah (2017). Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan di KUBE Sejahtera Desa Giripurno, Ngadirejo, Temanggung. *Skripsi*. Medan: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara.
- Nurmayanti, Siti., Sakti, Buana Putra Dwi., & Agustiani, Eka. (2020). Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 7(2):200-203.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Pengentasan Kemiskinan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan VII, Edisi IV*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Putro, Nugroho Bagus, Saiman, & Sihidi, Taqwa Iradhad. (2020). "Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Batu Kota Batu". Kolaborasi: *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3):310-329.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Rudi, Badrudin. (2012). *Ekonometika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPPSTM YKPN.
- Simbolon, Fenny, Rifka. (2020). Peranan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penerima KUBE di Desa Paindoan, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.

*Skripsi*, Departemen Kesejahteraan Sosial, USU. Medan.

Soraya, Ira. (2017). Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Penaklukan Kota Makassar. *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin: Makassar.

Sri Yuni & Hidayatulloh. (2015). Kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal PKS*. 14(2):163-180.

Subandi, (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Supriyatna, Tjahya. (2010). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung, Humaniora Utama Press.

Suyanto, Bagong. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-Trans Publishing.

Tami, Zulkarnain Astari., Heriyanto, Meyzi., & Yuliani, Febri. (2020). Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, 1(1):10-18.

Wildanu, Eka., Rengganis, Annisa., & Riyan. (2021). Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), *Jurnal SOSFILKOM*, XV(1): 8-17.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 SK Pembimbing Tahun Akademik 2021/2022



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 2149/Un.08/FEB/PP.00.9/10/2020

TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

#### DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dinilai perlu menunjuk dan menetapkan Pembimbing Skripsi dengan Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Menunjuk Saudara :  
a. Dr. Juanda, SE, MM Sebagai Pembimbing I  
b. A. Rahmat Adi, SE, M.Si Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Yulia Ananda  
N I M : 160604076  
J u d u l : Peran Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 1 Oktober 2020

D e k a n,

  
Zaki Fuadi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi;
  3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
  4. Mahasiswa yang bersangkutan;



## Lampiran 2 Surat Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3084/Un.08/FEBI/TL.00/11/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya
2. Ketua Kelompok Usaha Bersama Pidie Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YULIA ANANDA / 160604076**  
Semester/Jurusan : **XI / Ilmu Ekonomi**  
Alamat sekarang : **Jln. Amd Manunggal XLI No 8, Lamdom, Kec. Lueng Bata. Kota banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

**A R - R A N I R Y**

Banda Aceh, 22 November 2021  
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 14 Januari  
2022

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

### Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Kabupaten Pidie Jaya

 **PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Alamat: Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Cot Trieng. Telp/Fax 0653-51038, Kode Pos: 24186 - Meureudu**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 070 / 275 / 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PIDIE JAYA, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: YULIA ANANDA
Nim	: 160604076
Tempat / Tanggal Lahir	: Mns Blang 29 November 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Alamat	: Jl. Amd Manunggal XLI No 8 Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh

Benar nama yang tersebut di atas sedang melaksanakan penelitian dan telah mengumpulkan data-data awal dalam rangka penyusunan skripsi yang bersangkutan yang berjudul "**PERAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA**" berdasarkan Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Banda Aceh Nomor : 3084/Un.08/FEBI/TL.00/11/2021 tanggal 22 November 2021

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sepertiunya.

Meureudu, 8 Desember 2021  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kab. Pidie Jaya

**AR - RANIRY**

  
DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Pembina Utamak. Muda IV/c  
Nip. 19640208 196308 2 001

## Lampiran 4 Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA****1. Dinas Sosial**

<p><b>Tujuan 1:</b> Untuk mengetahui peran pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seperti apa pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari pihak Dinas Sosial, apakah ada sosialisasi, bapak/ibu?</li> <li>2. Bagaimana kriteria penerima manfaat program (KUBE) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, bapak/ibu?</li> <li>3. Bagaimana proses pembinaan dan pengawasan terhadap anggota penerima (KUBE) dari Dinas Sosial untuk kelangsungan kelompok tersebut, bapak/ibu?</li> <li>4. Menurut bapak/ibu, seperti kelompok (KUBE) yang sudah berjalan, apakah program (KUBE) di Kabupaten Pidie Jaya dapat mengentaskan kemiskinan?</li> </ol>
<p><b>Tujuan 2:</b> Untuk mengetahui kebijakan pemerintah melalui Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Jika pelaksanaan program (KUBE) belum optimal, bagaimana kebijakan dari pihak Dinas Sosial dalam dalam mengoptimalkannya, agar sasaran kelompok tersebut dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya, bapak/ibu?</li> <li>6. Apa yang setelahnya dilakukan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya?</li> </ol>
<p><b>Tujuan 3:</b> Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program</p>

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya
7. Apa saja kendala dari pihak Dinas Sosial dalam pelaksanaan program (KUBE), bapak/ibu?

## 2. Ketua Kelompok

<b>Tujuan 1:</b> Untuk mengetahui peran pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai ketua pengelola, bagaimana pelaksanaan/pengelolaan kelompok (KUBE) yang bapak/ibu pimpin?</li> <li>2. Bagaimana peran kelompok (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan kelompok pengelola dan anggota, bapak/ibu?</li> <li>3. Bagaimana pertukaran informasi yang terjadi antara ketua pengelolaa dan anggota dalam mengentaskan kemiskinan, bapak/ibu?</li> </ol>
<b>Tujuan 2:</b> Untuk mengetahui kebijakan pemerintah melalui Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Apakah ketua pengelola dan anggota mendapatkan pelatihan/pembinaan tentang program kelompok (KUBE) dari Dinas Sosial, bapak/ibu?</li> <li>5. Apakah ada kerjasama antara ketua pengelola dengan ketua pengelola kelompok (KUBE) lainnya yang di Kabupaten Pidie Jaya, bapak/ibu?</li> <li>6. Apakah ketua pengelola dan anggota melakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan dari kepala desa/masyarakat</li> </ol>

dalam penguatan kelompok, serta merekrut anggota lainnya, bapak/ibu?

**Tujuan 3:** Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya

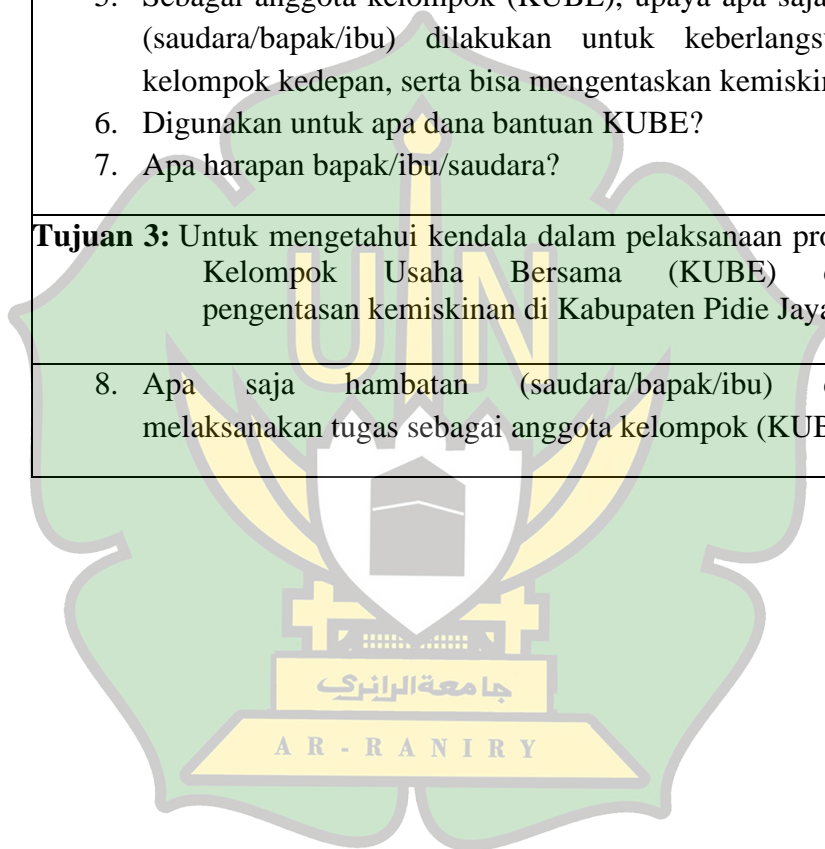
7. Apa saja kendala ketua pengelola dan anggota dalam pelaksanaan program (KUBE), bapak/ibu?
8. Dampak apa saja yang diterima oleh ketua pengelola dan anggota selama program (KUBE) ini berjalan, bapak/ibu?
9. Sebagai ketua pengelola, upaya apa saja yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan anggota dan keberlangsungan kelompok kedepan, bapak/ibu?
10. Apa yang harus KUBE lakukan agar pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya bisa di optimalkan?
11. Apa harapan anda kepada Dinas Sosial/pengurusnya?

### 3. Anggota Kelompok

**Tujuan 1:** Untuk mengetahui peran pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya

1. Apa ada perubahan sebelum dan sesudah (saudara/bapak/ibu) menjadi bagian dari kelompok (KUBE)?
2. Dari manfaat yang (saudara/bapak/ibu) terima, apakah sudah dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidup?
3. Apakah (saudara/bapak/ibu) mendapatkan informasi dari ketua pengelola dalam pelaksanaan kelompok (KUBE), bapak/ibu?
4. Apakah (saudara/bapak/ibu) mendapatkan bimbingan dari Dinas Sosial dalam program (KUBE)?

<b>Tujuan 2:</b> Untuk mengetahui kebijakan pemerintah melalui Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Pidie Jaya
<ol style="list-style-type: none"><li>5. Sebagai anggota kelompok (KUBE), upaya apa saja yang (saudara/bapak/ibu) dilakukan untuk keberlangsungan kelompok kedepan, serta bisa mengentaskan kemiskinan?</li><li>6. Digunakan untuk apa dana bantuan KUBE?</li><li>7. Apa harapan bapak/ibu/saudara?</li></ol>
<b>Tujuan 3:</b> Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya
<ol style="list-style-type: none"><li>8. Apa saja hambatan (saudara/bapak/ibu) dalam melaksanakan tugas sebagai anggota kelompok (KUBE)?</li></ol>



## Lampiran 5 Daftar Nama-Nama yang Diteliti

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	Kecamatan	Nama KUBU	Pekerjaan
1	Agus Fauzi, S.Kep, M.K.M s	Laki-laki	-			KABID Dinas Sosial
2	Rahmawati	Perempuan	Gp. Keude Lueng Putu	Banda Baru	Melati	Ketua
3	Mahyuni	Perempuan	Gp. Keude Lueng Putu	Banda Baru	Melati	Anggota
4	Siti Hawa ABD	Perempuan	Gp Peurade	Panteraja	Seulanga	Ketua
5	Fitriani	Perempuan	Gp Peurade	Panteraja	Seulanga	Anggota
6	Barossanah	Perempuan	Gp Mee Puduek	Trienggadeng	Seulanga	Ketua
7	Fatimah	Perempuan	Gp Mee Puduek	Trienggadeng	Seulanga	Anggota
8	Nurul Hijayati	Perempuan	Gp Mesjid Tuha	Meuredu	Usaha Rakan	Ketua
9	Ratna Dewi	Perempuan	Gp Mesjid Tuha	Meuredu	Usaha Rakan	Anggota
10	Erlianawati	Perempuan	Gp Dayah Kruet	Meurah Dua	Berkat Usaha	Ketua
11	Marlina	Perempuan	Gp Dayah Kruet	Meurah Dua	Berkat Usaha	Anggota
12	Said Ilham	Laki-laki	Gp Paya Baroh	Ulim	Bengkel Las Bersaudara	Ketua
13	Muzakir Usman	Laki-laki	Gp Paya Baroh	Ulim	Bengkel Las Bersaudara	Anggota
14	Rasyidah	Perempuan	Gp Kiran Dayah	Jangka Buya	Bungong Jumpa	Ketua
15	Nuraini	Perempuan	Gp Kiran Dayah	Jangka Buya	Bungong Jumpa	Anggota
16	Aman Farinsyah	Perempuan	Gp Uteun Bayu	Bandar Dua	Ubena	Ketua
17	Marliza	Perempuan	Gp Uteun Bayu	Bandar Dua	Ubena	Anggota



Lampiran 6 Foto Dokumentasi



Wawancara Kabid Dinas Sosial



Wawancara Sekretaris Dinas Sosial



Wawancara Kasi Dinas Sosial



Wawancara Ketua KUBE Kecamatan Mereudu



Wawancara Anggota KUBE Kecamatan Mereudu



Wawancara Ketua KUBE Kecamatan Meurah Dua





Wawancara Ketua KUBE Kecamatan Tringgadeng



Wawancara Ketua KUBE Kecamatan Ulim



Wawancara Ketua KUBE Kecamatan Panteraja



Salah satu Jenis Usaha